

Muliara Nurmanita, dkk.

PROSIDING HARMONISASI PANCASILA DAN AGAMA: MEMANTAPKAN IKLIM KONDUSIF MEMBANGUN BANGSA

Muliara Nurmanita, dkk.

PROSIDING
HARMONISASI PANCASILA DAN AGAMA:
MEMANTAPKAN IKLIM KONDUSIF MEMBANGUN BANGSA



Redaksi:
Dusun Bulu, RT 04/RW 04, Desa Jaten,
Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah 57771
Pos-el: penerbitpupa@gmail.com
Website: pupamedia.co.id
FB: PupaMediaOfficial

Nonfiksi

ISBN: 978-602-51294-1-4



9 786025 129414



Prodi Magister
Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Harmonisasi Pancasila dan Agama

Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa

Harmonisasi Pancasila dan Agama

Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa

Mutiara Nurmanita, dkk.



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Harmonisasi Pancasila dan Agama:

Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa

Copyright© 2018

CV Pupa Media

iv + 118 hlm.; 14 cm x 20 cm

ISBN: 978-602-51294-1-4

Penulis: Mutiara Nurmanita, dkk.

Penyunting Naskah: Anita Septiana

Penata Letak: Muhamad Hanif Prasetya

Perancang Sampul: Ivan

Redaksi:

CV Pupa Media

Dusun Bulu RT 04 RW 04 Jaten, Karanganyar

Pos-el: penerbitpupa@gmail.com

Tlp. 085725391700

Cetakan pertama: April 2018

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mutiara Nurmanita, dkk.

Harmonisasi Pancasila dan Agama: Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa / penulis naskah, Mutiara Nurmanita, dkk.. – Karanganyar: CV Pupa Media, 2018.

iv+118 hlm. ; 14 cm x 20 cm

ISBN: 978-602-51294-1-4

1. Nonfiksi: Penelitian. I. Judul II. Anggraini, Anita Septiana.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Isi di luar tanggung jawab Penerbit Pupa Media

Tim Penyusun

PROCEEDING

**SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA 2017**

**“Harmonisasi Pancasila dan Agama: Memantapkan Iklim Kondusif
Membangun Bangsa”**

Program Studi Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Gedung Pasca Sarjana
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

SUSUNAN PANITIA

Ketua panitia

Arif Adi Setiawan, S.Pd.

Sekretaris

Anisa Nur Rochmah, S.Pd.

Bendahara

Haniatul Hidayah, S.Pd.

Reviewer dan editor

Dr.Moh.Muchtarom, M.Si.

Laili Mufatakhah, S.Pd.

Anggi Agustin, S.Pd.

Perancang Sampul

Roni yudo Kuncoro, S.Pd.

Muhammad Marwan, S.Pd.

ISBN: 978-602-51294-1-4

Cetakan I, Edisi I, Mei 2018
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
ALL Right Reserved

DAFTAR ISI

1. Budaya Deradikalisasi Melalui Gerakan Pemuda Berbasis Ideologi Pancasila
Oleh Anisa Nur Rochmah, Ikrimah Saputra, dan Wendy Librata
RM 1
2. Muatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Buku Siswa Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Kuriulum 2013
Oleh An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani, Laili Mufatakhah, dan Hani'atul Hidayah 19
3. Akulturasi Budaya Islam dan Hindu Sebagai Wujud Harmonisasi Agama
Oleh Muhammad Yogi Guntoro, Ama Farida Sari, dan Anggi Agustin..... 37
4. Reinternalisasi Pancasila dan Agama dalam Upaya Pencegahan Radikalisasi di Perguruan Tinggi
Oleh Wachid Pratomo 47
5. Pengembangan Nilai-nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Mengengah Atas
Oleh Mutiara Nurmanita 67
6. Analisis Bahasa pada Butir-Butir Pancasila Ditinjau dari Konsep Berfilsafat guna Memperkuat Pendidikan Karakter
Oleh Rosaliana Intan Pitaloka dan Suryo Ediyono 75
7. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di Perguruan Tinggi
Oleh Suyahman 83

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

8. Urgensi Pendidikan Karakter dalam PPKn sebagai Implementasi PP Nomor 87 Tahun 2017
Oleh Erna Gestif, Roni Yudo Kuncoro, dan Syahrur Razy.... 99
9. Pandangan Arus Baru Gerakan Islam di Indonesia terhadap Ideologi Pancasila
Oleh Moh. Muchtarom..... 109

UPAYA DERADIKALISASI MELALUI GERAKAN PEMUDA BERBASIS IDEOLOGI PANCASILA

*Anisa Nur Rochmah¹, Ikrimah Saputra², dan Wendy Librata RM³
PPKn Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*

*Surel: nurrochmahanisa@gmail.com¹, Ikrimahsaputra96@gmail.com²,
dan wendypkn@gmail.com³*

ABSTRAK

Gerakan pemuda adalah salah satu komponen penting dalam upaya penanganan radikalisme yang marak saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran gerakan pemuda dalam membentuk sikap toleransi masyarakat secara umum sebagai upaya penanganan radikalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan teknik simak. Gerakan pemuda berbasis ideologi Pancasila saat ini memang menjadi tren karena sempat terjadi krisis Pancasila yang berujung pada fenomena radikalisme. Peran mereka dalam peningkatan literasi masyarakat tentang bahaya radikalisme cukup penting, sekalipun ada beberapa gerakan pemuda yang masih fokus dengan kegiatan internalnya sendiri. Namun, di sisi lain ada yang sudah mampu memberikan kontribusinya dalam penguatan ideologi Pancasila dalam lingkup masyarakat.

Kata kunci: *gerakan pemuda, radikalisme, toleransi, Pancasila*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Prinsip dan heterogenitas negara Indonesia diikat dalam Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kemajemukan dan perbedaan bangsa Indonesia merupakan suatu keunikan tersendiri yang menjadi identitas Negara Indonesia. Bersatu dalam perbedaan harus disadari oleh setiap orang sebagai suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kemajemukan terkadang memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antarkelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Hal ini mulai dikhawatirkan karena muncul indikasi ke arah yang dikhawatirkan. Salah satu dari indikasi tersebut adalah mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi lainnya. Organisasi tersebut berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok atau kepentingan lainnya yang memicu konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Agama pada dasarnya merupakan pedoman hidup bagi manusia yang terdiri atas nilai-nilai kebaikan, tetapi agama terkadang menjadi pemicu dan sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan konflik/ intoleransi (Kahmad, 2002: 151). Konflik yang berlatar belakang agama tersebut bukan dipicu oleh ajaran agamanya, tetapi dipicu oleh umat beragama yang memahami ajaran agamanya secara ekstrem dan menjadikan agama sebagai legitimasi. Burhani (2001: 22) menegaskan bahwa “Ekstrimisme banyak menjalar dan agama merupakan medan yang paling subur untuk tumbuhnya tindakan-tindakan itu”. Tanah yang subur untuk tempat perkembangan radikalisme dan ekstremisme tersebut diantaranya adalah agama Islam, Kristen, dan Yahudi (Hendropriyono, 2009: xxix). Pernyataan di atas, setidaknya menjelaskan bahwa agama sangat

rentan sebagai tempat tumbuh suburnya ekstremisme. Indonesia bukan merupakan negara agama, namun “Aktivitas dan semangat beragama penduduk Indonesia mencapai 99% sementara yang menyatakan tidak beragama hanya mencapai 1%” (Qodir, 2014: 268).

Menurut Khamami Zada (2002) tumbuh suburnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal umat beragama. Faktor internal radikalisme tersebut berhubungan dengan pemahaman agama yang ekstrem, sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan politik dan ekonomi global dan nasional (Sidiq, 2012: 73). Menurut Samuel P. Huntington, faktor eksternal itu disebut sebagai *clash of civilization* (benturan peradaban) yang menempatkan Islam sebagai musuh Barat dalam bidang politik, ekonomi, dan militer (Azra, 2002: 10).

Pernyataan di atas dapat dimaknai, bahwa radikalisme dapat lahir dan tumbuh subur dalam kehidupan umat beragama yang memahami ajaran agamanya secara ekstrem dan menjadikan agama sebagai legitimasi terhadap berbagai masalah benturan peradaban Barat dengan umat muslim dalam bidang politik dan ekonomi. Pada konflik internasional, benturan peradaban antara Barat dengan umat muslim tersebut kemudian melahirkan gerakan-gerakan agama ekstrem dan radikal yang tujuannya sebagai perlawanan atas dominasi negara Barat seperti kelompok Al-Qaeda dan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) yang mengklaim Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah baru umat muslim. Munculnya gerakan radikal seperti ISIS dan kelompok Al-Qaeda, memiliki intensi untuk menjadikan Islam sebagai justifikasi kekuasaan dengan mengabsahkan kekerasan dan diskriminasi (Fajar dalam Komaruddin Hidayat, 2014: 165).

Perkembangan gerakan radikalisme agama seperti ISIS (NISS) di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia yang mayoritas muslim telah mendapatkan simpatisan dan dukungan dari kelompok

masyarakat tertentu. Bahkan tidak sedikit dari kelompok simpatisan tersebut ikut bergabung bersama dalam mendeklarasikan negara Khilafah atas nama kedaulatan Tuhan versi mereka. Perkembangan radikalisme tidak terlepas dari percepatan proses global. Menurut David Hell “Globalisasi mempercepat keterhubungan manusia di seluruh dunia dalam segala aspek kehidupan kontemporer, kultural hingga kriminal, finansial hingga spiritual” (Kalidjernih, 2011: 54). Pernyataan tersebut memberikan suatu bentuk pengertian bahwa globalisasi pada kenyataannya dapat menghubungkan dan memfasilitasi kelompok-kelompok ekstrem radikal untuk menyebarkan ideologinya dan menunjukkan eksistensinya melalui percepatan proses global via media berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat di dunia. Maka globalisasi secara tidak langsung dapat mendorong penyebaran paham radikalisme di berbagai negara.

Menurut MUI pusat, “Radikalisme merupakan paham dan tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik bidang sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrem” (Qodir, 2014: 80). Artinya, paham radikalisme mempunyai rencana dan harapan adanya perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat dengan berpikir asasi dan ekstrem. Lebih lanjut, menurut Agus (2014: 155), radikalisme dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Pemikiran, dalam hal pemikiran radikalisme berfungsi sebagai ide bersifat abstrak dan diperbicangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.
- 2) Tindakan, dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi. Pada level ini,

radikalisme mulai bersinggungan dan memiliki unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme.

Pernyataan di atas dapat dimaknai, bahwa konflik yang terjadi dalam beragama bukan karena ajaran agamanya namun karena umat beragama yang ekstrem dan menjadikan agama sebagai legitimasi pada masalah politik dan ekonomi. Di mana radikalisme dapat berbentuk pemikiran dan dapat berbentuk tindakan. Radikalisme sebagai bentuk pemikiran apabila dalam perkembangannya tidak dapat dinetralisir maka akan berproses pada radikalisme dalam bentuk aksi dan berpotensi menjadi terorisme.

Perkembangan radikalisme juga menyasar di negara Indonesia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2011 sungguh mengejutkan, hampir 50% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Seperti dilansir berita online BBC Indonesia bahwa:

Survei tentang radikalisme yang dilakukan di 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan hampir 50% pelajar mendukung cara-cara keras dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. Bahkan, belasan pelajar menyetujui aksi bom bunuh diri. Survei ini dikerjakan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011 oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo --yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

(Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.shtml, diakses pada 17 Desember 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan teknik simak

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Radikalisme dan Pancasila

Radikalisme agama di Indonesia tidak sejalan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pendapat Yudi Latif,

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara atau bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam pancasila pada dasarnya mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan... (Komaruddin Hidayat, 2014: 268).

Maksudnya, Pancasila dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan antara paham radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan.

Menurut Abegebriel (2004) sikap seseorang yang radikal ditandai dengan empat hal, yaitu

1) sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, 2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, 3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan kebanyakan, dan 4) sikap revolusioner, yaitu cenderung memakai kekerasan untuk mencapai tujuan (Rosidin, 2014: 15).

Dari empat hal di atas, tampak bahwa salah satu aspek yang turut membentuk lahirnya radikalisme adalah sikap tidak toleran.

Tumbuh suburnya pemikiran tentang radikalisme di kalangan pelajar merupakan suatu ancaman terhadap ketahanan negara, sebab

radikalisme berkorelasi dengan aksi kekerasan dan bahkan dalam prosesnya berpotensi pada tindakan terorisme. Seorang yang radikal belum tentu seorang teroris, namun seorang teroris sudah pasti radikal. Maksudnya, akar dari tindakan teroris adalah pemikiran tentang radikalisme. Oleh karena itu, akibat dari seorang atau kelompok yang memiliki pemikiran tentang radikalisme dalam prosesnya dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka diperlukan strategi pencegahan awal (*preventif*) terhadap perkembangan paham radikalisme. Strategi pencegahan awal dalam menangkal radikalisme dapat dilakukan dengan cara deradikalisasi. Menurut *International Crisis Group* (2007) “Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root cause*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal” (Rokhmad, 2014: 29).

Deradikalisasi sebagai upaya pencegahan perkembangan paham radikalisme dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip multikultural. Salah satu wujudnya adalah dengan saling menghormati dan bersikap toleransi terhadap keragaman yang ada (Yusuf Qardlawi dalam Rosidin, 2014: 2). Lebih lanjut, Masduqi (2011: 5-6) menambahkan bahwa:

Toleransi sangat perlu diwacanakan di masyarakat guna meminimalkan kekerasan atas nama agama yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi, baik di luar maupun di dalam negeri. Toleransi semakin mendesak dibumikan dalam rangka mewujudkan koeksistensi, yakni kesadaran hidup ber-dampingan secara damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Bahkan bisa dikatakan bahwa keberlangsungan Bhinneka Tunggal Ika dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya

penerimaan terhadap keberbedaan tergantung pada sejauh mana toleransi diterima di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek yang menyebabkan tumbuh suburnya perkembangan radikalisme adalah sikap tidak toleran. Sehingga perlu adanya usaha dalam membentuk dan membina sikap toleransi guna menangkal perkembangan paham radikalisme di Indonesia. Toleransi tidak hanya sebatas hubungan antarumat beragama, namun juga hubungan antarwarga negara Indonesia yang harmoni, damai dan sejahtera. Usaha menetralsir atau mencegah perkembangan paham radikalisme ini disebut sebagai deradikalisasi.

Toleransi merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) nilai karakter yang harus ditanamkan dan dibina kepada seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai karakter tersebut lahir dari pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Tanpa usaha mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan maka tindakan radikalisme akan menyebabkan kehancuran Negara seperti yang telah terjadi di berbagai negara timur tengah pada sekarang ini. Berkenaan dengan pembentukan sikap toleran, Haryatmoko (2007) menjelaskan bahwa “Sikap toleransi tidak akan datang begitu saja dalam pemikiran dan kesadaran seseorang atau masyarakat. Sikap yang toleran merupakan akumulasi dari proses pembelajaran dan pembiasaan yang panjang” (Naim & Sauqi, 2010: 106). Artinya cara pandang yang toleran adalah hasil dari pembelajaran dan pengasahan kesadaran yang dilakukan terus-menerus. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu usaha terbaik dalam membentuk sikap toleransi.

B. Upaya Deradikalisasi Melalui Gerakan Pemuda Berbasis Ideologi Pancasila

Dalam konteks umat Islam Indonesia, “ide *toelogi* multikultural bukan sesuatu yang sulit untuk dikembangkan agama Islam di Indonesia adalah agama Islam yang dikenal sangat moderat”. (Agus, 2016: 222) “Moderasi ini tumbuh secara organik dari akar-akar sejarah islamisasi yang terjadi di tanah air justru berawal dari cara-cara yang sangat multikultural yang ditandai oleh pengakuan nilai-nilai lokal yang berdampingan dengan nilai-nilai lain”. (Abdurahman Wahid, 2014: 12)

Menurut Agus “Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh pendiri bangsa sengan melalui proses dan musyawarah yang panjang Pancasila menjadi kontrak sosial kita untuk hidup di negeri ini dan karena itu dipahami sebagai paham kebangsaan”. (Agus, 2016: 237). Lebih Lanjut Menurut Yudi Latif “mengamalkan nilai-nilai universal dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan Pancasila” (Yudi, 2011: 10). “Dengan demikian untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen mustahil tanpa memandangnya berasal dari nilai luhur agama yang dianut di Indonesia” (Agus, 2016: 241).

Agama pada dasarnya mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari wahyu Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan sila pertama sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama dalam Pancasila mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai agama dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Karena tiap agama mengajarkan tentang toleransi sebagai landasan kerukunan antarumat beragama. Agama Islam menjelaskan toleransi beragama dalam Surat *Al- Kafirun* ayat 6, yang berbunyi “Untukmu adalah agamamu dan untukku adalah agamaku”. Agama Protestan dan Katolik dalam Korintus 4: 6

yang berbunyi “Hendaklah tiap-tiap orang tetap seperti yang ditentukan Tuhan baginya” dan Konsili Vakitan III yang berbunyi “Gereja menunjukkan rasa hormat terhadap Hinduisme/Budhiisme dan terhadap agama Islam yang menyembah Allah yang Maha Esa serta menghormati Isa sebagai Nabi. Sikap permusuhan antara Kristen dan Islam harus diganti dengan saling pengertian dan kerja sama dalam keadilan sosial, perdamaian dan kebebasan. Agama Hindu dalam Bhagavadgita percakapan ketiga ayat 33, yang berbunyi: “Manakala orang bijaksana berbuat, menurut bijaksananya. Semua makhluk menurut sifatnya pula. Menurut agama Budha dalam Sanghyang Kamahayanika ayat 52 yang bunyinya “Demikianlah apa yang aku nasehatkan padamu, akhirnya tergantung padamu untuk mempercayai engkau tidak percayai aku, aku tidak memaksa agar engkau percaya padaku (Sahibi Naim, 1983: 41).

Lebih lanjut menurut Eko Wibowo “Pancasila adalah titik temu atau landasan filosofis bersama bangsa Indonesia dalam beragama. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dengan keberbagaian cara menghayati agamanya, ia mempunyai satu religiositas yang sama, yaitu adanya pengakuan bersama terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa” (Wibowo, 2008: 75).

Lebih lanjut (Yudi, 2011: 177) “Mengungkapkan bahwa sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial”.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya adalah pengakuan, *recognition*, dari Negara bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang ber Tuhan, yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945. Menurut (Winarno, 2014: 104), terminologi instrumen hak asasi manusia dewasa ini, substansi sila pertama ini disifatkan sebagai *non derogable rights* (hak asasi yang

tidak dapat dikurangi kapanpun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun). “Negara harus melindungi seluruh rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa melakukan diskriminasi apapun juga”. (Sunardi, 2005: 25).

Menurut Yudi (2011: 114) “Nilai-nilai ketuhanan yang di kehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai *profetis* agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan”. Lebih lanjut Oktofianto (2015: 63) mengungkapkan "Pancasila, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia mengajarkan tentang kerukunan antar umat ber-agama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Maka perkembangan paham radikalisme yang dibawa ideologi transnasional dengan sifat intoleran bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia".

Menurut (Yudi, 2011:43) “Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial”.

Lebih lanjut Menurut Wibowo (2008: 74) “Pancasila merupakan obyektifikasi dari nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah, ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai luhur. Ini berarti bahwa unsur-unsur objektif agama-agama ada dalam Pancasila”.

Lebih lanjut menurut Agus (2016: 239) “Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan pedoman negara Indonesia yang berisi lima sila universal yang memayungi masyarakat Indonesia. Kelima sila ini berisikan wawasan kemajemukan yang khas Indonesia baik dari persepektif keagamaan, kemanusiaan, kenegaraan dan kebangsaan”.

Lebih lanjut menurut (Budiyono, 2014: 414) “Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa

alam semesta berserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya”.

Menurut Bung Hatta “Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antarmanusia dan bangsa” (Feith, 1988: 80). Senada hal itu Yudilatif mengungkapkan bahwa “Di bawah bimbingan nilai-nilai etis ketuhanan yang memimpin cita-cita negara kita. Semua manusia dipandang setara dan bersaudara yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan *universal* serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab” (Yudi, 2011: 125).

Menurut Nurcholis (1995: 67) mengemukakan “pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*), dan tingkah laku penuh percaya kepada itikad baik kepada orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis”. Lebih lanjut (Notonegoro, 1974: 55) mengungkapkan bahwa “Kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas desain *sunatullah* (hukum Tuhan) yang menciptakan perbedaan dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia dengan mengembangkan sikap positif melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial”.

Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat artinya manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda manusia yang satu dengan yang lainnya.

Senada dengan hal di atas menurut (Hikam, 2016: 45) “Penanggulangan terorisme dan gerakan radikal melalui pendekatan lunak memerlukan landasan riil melalui pendekatan lunak memerlukan landasan idiil yang komprehensif. Terdapat lima sila yang secara komprehensif menjabarkan arti kehidupan bernegara yang dapat dijadikan landasan melawan Ideologi yang radikal”.

- 1) Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa
Sila ini mengandung makna tauhid, toleransi, kemajemukan, dan moderat yang seimbang dalam konteks hubungan antar-umat beragama, Pancasila menolak pemaksaan kehendak pribadi maupun kelompok satu sama lain berdasarkan penafsiran agama yang dianggap paling benar.
- 2) Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini mengandung makna pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan hak sosial budaya. Dengan demikian, pemaksaan kehendak oleh kelompok radikal secara hakiki bertentangan dengan Pancasila karena jelas melanggar HAM.
- 3) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia
Sila ini mengandung makna bahwa Indonesia dibangun berdasarkan asas kebangsaan bukan atas dasar agama, suku atau ras tertentu kelompok fundamentalis radikal ingin mengganti asas kebangsaan dengan asas yang lain.
- 4) Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Sila ini mengandung arti bahwa sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia harus berlandaskan pada prinsip demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat ini jelas bertentangan dengan sistem totaliter yang ingin didirikan oleh kaum fundamentalis radikal.

- 5) Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa kesejahteraan menjadi hak warga negara RI. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hal ini berarti sistem totaliter yang eksploratif bertentangan dengan Pancasila karena ia tidak mengakui adanya hak bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan sebagai hak dasar mereka.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila yang universal dapat menjadi bagian utama dari pembentukan karakter bangsa menjadi jiwa-jiwa Pancasila yang memiliki sifat dan sikap berketuhanan, beradab, menjunjung tinggi rasa persatuan, bijaksana dan memiliki rasa adil yang toleran.

Ideologi Pancasila merupakan ideologi persatuan yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh Bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai ideologi yang kuat Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang dapat menjadikan sebuah ideologi kuat yaitu Dimensi Realita, Dimensi Idealisme dan Dimensi Fleksibilitas atau Dimensi Perkembangan dengan ketiga dimensi di atas Pancasila menjadi ideologi yang kuat di tanahnya sendiri. Penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan untuk melindungi generasi muda dari gerakan radikal yang mulai mengancam NKRI terutama mulai terancamnya ideologi Pancasila oleh paham-paham radikal. Penguatan Ideologi Pancasila di kalangan generasi muda merupakan salah satu dasar utama dalam melindungi generasi muda dari paham radikal pro-kekerasan karena ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam kehidupan di masyarakat nilai-nilai tersebut antara lain adalah “kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaan, persatuan, kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, kesejahteraan.

Salah satu faktor seseorang bisa menjadi radikal adalah karena adanya krisis identitas pada dirinya sehingga orang tersebut dapat dengan mudah untuk dipengaruhi dengan berbagai macam Ideologi radikal yang mengarah kepada kekerasan

Proses menjauhkan seseorang atau kelompok dari paham radikal disebut juga dengan deradikalisasi. Proses deradikalisasi ini harus memenuhi prinsip-prinsip yang mengedepankan rasa kemanusiaan. Demi tercapainya tujuan dari proses deradikalisasi diperlukan strategi yang tepat dalam menjalankan proses deradikalisasi adalah dengan *counter ideology* yaitu dengan mengubah Ideologi radikal ekstrem dengan Ideologi yang tidak radikal dengan terciptanya kondisi yang bebas dari paham radikal diharapkan generasi muda akan lebih mencintai dan menghargai bangsanya serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Pemerintah tidak sendiri dalam memerangi paham radikal yang berkembang di masyarakat, terdapat ormas dan LSM yang juga melakukan proses deradikalisasi demi menjauhkan generasi muda yang jauh dengan paham radikal. Salah satu ormas tersebut adalah Gerakan Pemuda Anshor deradikalisasi pada OKP Gerakan Pemuda Anshor dilakukan dengan menguatkan Ideologi Pancasila melalui berbagai macam Program kerja diantaranya Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) yaitu pelatihan yang materi utamanya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain PKD ada juga diklat *Rijalul Anshor*, dan BMT.

KESIMPULAN

Gerakan pemuda berbasis ideologi Pancasila saat ini memang menjadi tren karena sempat terjadi krisis Pancasila yang berujung pada fenomena radikalisme. Peran mereka dalam peningkatan literasi masyarakat tentang bahaya radikalisme cukup penting, sekalipun ada beberapa gerakan pemuda yang masih fokus dengan kegiatan internalnya sendiri, namun di sisi lain ada yang sudah mampu

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

memberikan kontribusinya dalam penguatan ideologi Pancasila di lingkup masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh gerakan Pemuda Ansor yang melakukan penguatan Ideologi Pancasila melalui berbagai macam Program kerja diantaranya Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) yaitu pelatihan yang materi utamanya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain PKD ada juga diklatsar, *Rijalul Ansor* dan BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. "Hubungan Antar-Agama, Dimensi Internal dan eksternalnya di Indonesia" dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Seri Dian 1 tahun 1 Yogyakarta: Interfedei.
- Agus SB. (2014) *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi* Jakarta: Daulat Press.
- Agus SB. (2016) *Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.
- Azra, A. (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme & Pluralisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burhani. (2001). *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membingkar Doktrin yang Membantu*. Jakarta: Kompas
- Feith, H. (2001). *Sukarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hendropriyono AM. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* Jakarta: Kompas
- Hidayat, Komaruddin. (Ed). (2014). *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*. Bandung: Mizan
- International Crisis Group (ICG). (2007). *Deradikalisasi dan Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia* Jakarta: Asia report
- Kahmad. (2002). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kalidjernih, F.K. (2011). *Puspa Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Latif, Yudi. (2011) *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas Aktualitas Pancasila* Jakarta: Gramedia.
- Masduqi, I. (2011). *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung: Mizan.
- Naim, N. & Sauqi, A. (2010). *Pendidikan Multikultural Konsep Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

- Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara* Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Qodir, Zuly. (2008). *Nabi-Nabi Baru di Indonesia, Aliran Aliran Agama Yang Disesatkan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rosidin. (2014). Sufisme Perkotaan Dan Nalar Beragama Inklusif (Studi atas Peran Jamuro dalam Upaya Deradikalisasi Gerakan Keagamaan di Surakarta). *Jurnal Analisa*, Vol. 21 November 01 Juni 2014, 13-24.
- Wibowo, Agus. (2012). *Pendidikan Karakter (Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

MUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BUKU SISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI KURIKULUM 2013

An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani (annisansis@student.uns.ac.id),
Laili Mufatakhah (lailimufatakhah@student.uns.ac.id),
Hani'atul Hidayah (haniatulhidayah08@student.uns.ac.id)
Program Studi PPKn Pascasarjana UNS

ABSTRAK

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri siswa yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan nilai-nilai Pancasila dalam Buku teks Siswa Kelas XI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013 yakni pada muatan materi dan rubrik yang terdapat dalam buku siswa. Hasil penelitian menunjukkan buku siswa tersebut memuat nilai-nilai Pancasila, baik dalam BAB yang membahas mengenai Pancasila maupun BAB yang membahas materi selain Pancasila. Muatan nilai-nilai Pancasila dalam buku siswa tidak hanya terdapat dalam rubrik uraian materi saja, melainkan juga dalam rubrik lain seperti rangkuman, tugas mandiri, tugas kelompok, info kewarganegaraan, refleksi, dan rubrik lainnya.

Kata kunci: PPKn, nilai-nilai Pancasila, buku siswa, Kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan unsur penting dalam suatu negara. Pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula yang akan menunjang proses pembangunan dalam suatu negara. Pendidikan Nasional di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dari Pendidikan Nasional Indonesia tersebut, tidak dapat terlepas dari ajaran dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disepakati bersama dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dijadikan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diwariskan dan ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, salah satunya yakni melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang mengemban amanah untuk melestarikan nilai-nilai

Pancasila yang darinya diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang baik meliputi berbagai unsur, salah satunya yakni buku yang menjadi sumber belajar. Buku sebagai salah satu sumber belajar siswa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pendidikan. Maka sudah seyogianya nilai-nilai Pancasila melingkupi isi buku siswa PPKn di Indonesia. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya, yakni dimana dalam Kurikulum sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP, muatan materi Pancasila dirasa kurang dan materi lebih berfokus pada uraian pengetahuan yang berfokus pada pendidikan politik, yang mengakibatkan kurang tertanamnya nilai-nilai Pancasila dan dirasakan semakin meluntur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian guna mengetahui muatan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Penelitian analisis konten merupakan penelitian untuk membuat simpulan yang dapat direplikasi dari teks (atau materi penting lainnya) dalam konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004: 18). Analisis konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis konten yang terdapat dalam buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013 yang berjudul "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017" terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Penelitian ini menganalisis pada muatan nilai Pancasila yang ada dalam buku siswa tersebut,

yakni pada muatan materi dan rubrik yang terdapat dalam buku siswa.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *sampling* dengan teknik *nonrandom sampling*. Adapun sumber data *sampling*-nya adalah buku siswa PPKn SMA yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017”. Buku siswa ini dijadikan *sampling* dalam penelitian karena telah dijadikan sebagai buku wajib pegangan guru dan pegangan siswa dalam Kurikulum 2013. Bagian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah muatan nilai Pancasila yang tersebar dalam seluruh bagian buku. Pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis cermat dan pencatatan tentang muatan nilai Pancasila yang ada dalam buku teks. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan validitas dan realibilitas data. Validitas data yang digunakan adalah validitas semantik. Validitas semantik ini merupakan validitas yang dilakukan dengan cara mengamati data-data pada bagian pendahuluan yang berupa pengantar, berisi gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari, beserta ilustrasi gambar atau lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran, bagian inti yang berupa materi pembelajaran yang berisi rubrik materi, rubrik info kewarganegaraan, dan rubrik penanaman kesadaran berkonstitusi, tugas mandiri dan tugas kelompok, bagian penutup berisi refleksi dan rangkuman, uji kompetensi, penilaian sikap, proyek kewarganegaraan, dan program pengayaan. Sedangkan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah realibilitas intrarater, yaitu dengan cara membaca dan mengkaji ulang data yang didapat, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Buku yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 Kelas XI yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka pengimplementasian Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini terdiri dari enam bab. Hasil penelitian mengenai contoh muatan materi Pancasila dalam keenam bab yang terdapat pada buku siswa PPKn Kurikulum 2013 Kelas XI disajikan dalam tabel berikut.

| No. | BAB | Contoh Kalimat | Rubrik |
|--|--|--|----------------------|
| 1. | Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila | “Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan YME dengan sungguh-sungguh” (Nilai Ketuhanan) | Pengantar materi |
| | A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia | “Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang.” (Nilai Kemanusiaan) | Materi |
| | B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila | “Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkait dengan setiap sila Pancasila” | Tugas Mandiri |
| | C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia | “Dalam hubungannya dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan hal-hal sebagai berikut...” | Info Kewarganegaraan |
| D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) | | | |

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

| | | | |
|----|---|---|------------------------|
| | | <p>“Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk dijadikan dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia.”</p> | Refleksi |
| | | <p>“Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia”</p> | Rangkuman |
| | | <p>“Lakukan identifikasi dan wawancara kepada masyarakat mengenai pelanggaran HAM dan tentukan nilai Pancasila yang Dilanggar”</p> | Proyek Kewarganegaraan |
| 2. | <p>Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila</p> <p>A. Hakikat Demokrasi</p> <p>B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila</p> | <p>“...Itu semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar kalian secara terus menerus” (Nilai Ketuhanan)</p> | Pengantar Materi |

*Muatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Buku Siswa
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013*

| | | |
|---|---|----------------------|
| C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia | <p>“Rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara” (Nilai Kerakyatan)</p> | Materi |
| | <p>“Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”</p> | Info Kewarganegaraan |
| | <p>“Setelah kalian memahami karakteristik negara yang demokratis, coba kalian bayangkan jika kalian tidak diperlakukan sama di depan hukum. Bayangkan pula apabila anggota masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak.”</p> | Materi |

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

| | | | |
|----|--|--|---------------------------------|
| 3. | <p>Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia</p> <p>A. Sistem Hukum di Indonesia</p> <p>B. Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia</p> <p>C. Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum</p> | <p>“...Tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat”</p> | Materi |
| | | <p>“Melaksanakan ibadah tepat waktu” (Nilai Ketuhanan)</p> | Penilaian Sikap |
| 4. | <p>Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia</p> <p>A. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional</p> <p>B. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional</p> | <p>“Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta : ... meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita.”</p> | Info Kewarganegaraan |
| | | <p>“... selain menekankan komitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, ketua Delri sekali lagi juga menyampaikan komitmen RI untuk memberikan bantuan. Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina.” (Nilai Kemanusiaan)</p> | Teks Berita dalam Tugas Mandiri |

*Muatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Buku Siswa
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013*

| | | | |
|----|---|---|------------------|
| | | “Apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk ke dalam sila ke berapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina?” | Tugas Mandiri |
| | | “Berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana alam atau konflik di negara lain” (Nilai kemanusiaan) | Penilaian Sikap |
| 5. | Mewaspada ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia | “Aku cinta Indonesia! Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia... Mencintai dan menjunjung tinggi negara sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.” (Nilai Persatuan Indonesia) | Pengantar Materi |
| | A. Menelaah ancaman terhadap Integrasi Nasional | | |
| | B. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipelekosbudhan kam dalam Membangun Integrasi Nasional | “Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita, kecintaan kepada negara semakin hari semakin besar, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.” (Nilai Ketuhanan) | Pengantar Materi |
| | | “Pada saat ini sering sekali terjadi kasus-kasus bernuansa politik yang berpotensi melumpuhkan | Tugas Mandiri |

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| | | integrasi nasional seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut” (Nilai Persatuan) | |
| | | “Menghormati orang lain yang sedang beribadah” (Nilai Ketuhanan, Persatuan) | Penilaian Sikap |
| 6. | Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | “Kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menakdirkan kita sebagai warga negara Indonesia.” (Nilai Ketuhanan) | Pengantar Materi |
| | A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa | “Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang besar yang harus kita banggakan.” (Nilai Persatuan) | Pengantar Materi |
| | B. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | “Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme ... <i>pro patria</i> dan <i>primus patrialis</i> yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air; jiwa solidaritas dan setia kawan; jiwa toleransi dan tenggang rasa antaragama, antar suku, antargolongan, dan antarbangsa” (Nilai Persatuan) | Info Kewarganegaraan |
| | C. Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia | | |
| | D. Perilaku yang Menunjukkan Sikap Menjaga | | |

*Muatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Buku Siswa
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013*

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | “Diskusikanlah bersama kelompok ... Mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan?” (Nilai Keadilan, Persatuan) | Tugas Kelompok |
| | | “Nilai-nilai Pancasila dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antarsesama. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.” | Materi |

Pembahasan

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter yang bersifat multidimensional "*citizenship education*" mengemban visi dan misi utuh pengembangan "*civic competencies*". Di dalam kemampuan tersebut terkandung sasaran pengembangan: "*civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic competence, civic confidence, civic committment*" yang bermuara pada kemampuan integratif "*well informed and reasoned decision making*". Secara praktis ke semua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh individu agar dapat berperan sebagai "*participative and responsible citizen*" (CCE: 1996) atau *warganegara Indonesia yang cerdas dan baik* (Winataputra: 2001).

Menurut pendapat *The National Curriculum Council* (Edwards and Fogelman, 2000: 94), Pendidikan Kewarganegaraan (*Education for Citizenship*) bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang

berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan juga mengemban misi multidimensional (Cogan: 1996, Winataputra: 2001) yakni: (1) misi psikopedagogis, yakni pengembangan potensi peserta didik; (2) misi psikososial penyiapan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa, dan (3) misi sosiokultural untuk membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang Demokratis. Bagi dunia akademik, selain ketiga misi tersebut dikembangkan misi penelitian dan pengembangan (*research and/or development*) untuk membangun pendidikan kewarganegaraan sebagai *integrated knowledge system* (Hartonian: 1970) atau *synthetic discipline* (Somantri: 1996) yang dikembangkan secara perseorangan dan/atau komunitas dan melalui program magister dan doktor pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu, Sanusi (1999) menyatakan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warganegara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sanusi adalah warganegara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum.

Hal tersebut bisa kita lihat pada ke-6 bab pada buku guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 2013 di atas. Di dalam buku PPKn kurikulum 2013 ini, isi materi tidak hanya

menekankan pada sisi kognitif (pengetahuan) siswa saja melainkan juga pada penekanan pembentukan karakter pancasila, sebagaimana data hasil penelitian di atas. Pada setiap tugas atau bab yang ada di dalam buku tersebut selalu menekankan pada pembentukan karakter pancasila siswa. Tugas tersebut meliputi tugas yang berasal dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Tujuan dari tugas yang ada dalam materi buku kurikulum 2013 tersebut adalah untuk membentuk *civic knowledge*, *civic skill* maupun *civic disposition* melalui kegiatan diskusi, belajar kelompok maupun tugas mandiri.

Jasen dan Knight (Beninga, 1991) menyatakan bahwa pengajaran moral secara langsung dapat berupa penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan bermain peran, atau melalui pemberian hadiah (pujian) bagi perilaku yang sesuai.

Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pembentukan kewarganegaraan masa kini yaitu warga negara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif. Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.

Isi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada kurikulum 2013 ini memiliki Pendekatan dan prinsip pembelajaran PPKn yang difokuskan pada bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar sosial (*social learning theory*) yang menyatakan, bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral melalui pencontohan dan penguatan (*reinforcement*). Pendukung teori ini mengakui, bahwa anak-anak mulai berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan standar orang dewasa karena para orang tua dan guru menindaklanjuti “perilaku yang baik” dengan penguatan positif dalam bentuk persetujuan, kasih sayang (afeksi), dan hadiah lainnya (Berk, 1994). Mereka meyakini bahwa anak-anak belajar untuk berperilaku moral secara luas melalui pencontohan (*modeling*), dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan perilaku yang pantas.

Materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan

tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap. Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam materi yang terdapat dalam buku SISWA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Kurikulum 2013, masing-masing bab di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan. Muatan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya terdapat dalam bab atau materi mengenai Pancasila saja, melainkan terdapat dalam semua bab. Muatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terdapat dalam rubrik materi, melainkan terdapat dalam rubrik lain yang terdapat pada buku siswa Kelas XI seperti rubrik pengantar materi, info kewarganegaraan, refleksi, rangkuman, tugas mandiri, tugas kelompok, serta rubrik penilaian sikap.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat disampaikan saran bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipertahankan muatannya dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya dalam materi atau bab mengenai Pancasila saja, melainkan dalam setiap bab, karena Pancasila merupakan dasar negara serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, sehingga nilai-nilainya harus menjadi

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

landasan dalam penyusunan materi pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benninga, J. S. 1991. *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teacher College Press.
- Berk, L. E. 1994. *Child Development*. Boston: Allyn & Bacon.
- Cogan, John J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Hartonian, H.M. (1992) *The Social Studies and Project 2061: An Opportunities for Harmony*, dalam *The Social Studies*, 83;4:160-163
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017"*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content analysis an introduction to its methodology*. London: International Education and Professional Publisher.
- Sanusi, A. 1999. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Makalah yang dipresentasikan pada Conference on Civic Education for Civil Society, di Bandung 16-17 Maret 1999.
- Somantrie, H. dan Ibrahim D. (1999) *Indonesian School Civic Education: Practioner's Visions*, Bandung: CICED.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winaputra. (2001) *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*, Bandung, Program Pascasarjana UPI (Disertasi).

AKULTURASI BUDAYA ISLAM DAN HINDU SEBAGAI WUJUD HARMONISASI AGAMA (STUDI PADA MASYARAKAT SEKITAR MENARA KUDUS KABUPATEN KUDUS)

Muhammad Yogi Guntoro¹, Ama Farida Sari², dan Anggi Agustin³
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surel: yogi.guntoro5158@gmail.com¹, amafaridasari@ymail.com²,
dan anggi.agustin92@yahoo.com³

ABSTRAK

Kebudayaan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hubungan antarmanusia yang ada di sekitarnya. Kebudayaan dapat timbul karena adanya suatu ide atau gagasan yang sama antara manusia yang saling berhubungan dan berinteraksi sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang mereka yakini kebenaran dan eksistensinya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akulturasi budaya Islam dan Hindu sebagai wujud harmonisasi agama yang ada di sekitar wilayah menara kudos dan bagaimana penerapan akulturasi budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan fokus penelitian pada akulturasi budaya yang dihasilkan agama Islam dan Hindu di sekitar menara Kudus serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari informan, observasi, dan dokumen. Teknik *sampling* yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yakni terdiri dari empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan akulturasi budaya yang

dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sekitar menara kodus diwujudkan melalui bentuk bangunan tempat peribadatan dan beberapa arsitektur bangunan yang saling menggunakan desain perpaduan antara Islam dan Hindu serta tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang mengharuskan antarumat beragama saling menghormati peraturan dari masing-masing agama sebagai wujud harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perwujudan harmonisasi agama sangat beragam, salah satunya melalui akulturasi budaya yang merupakan perpaduan dua agama sehingga hubungan antaragama dapat terjalin dengan harmonis sebagai wujud penerapan nilai Pancasila.

Kata kunci: *akulturasi, budaya, agama*

PENDAHULUAN

Setiap individu dalam masyarakat pasti melakukan interaksi sosial sebagai perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara. Interaksi sosial tersebut diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan bahkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah budaya. Kata budaya berasal dari kata *buddhayah* sebagai bentuk jamak dari *buddhi* (*Sanskerta*) yang berarti '*akal*' (Koentjaraningrat, 1974: 80). Proses kegiatan individu yang dilakukan dalam masyarakat tidak terlepas juga dari masalah individu hingga kelompok yang berdampak pada kegiatan yang mereka lakukan. Setiap orang memiliki karakteristik dan sifat bawaan yang kemudian akan mereka bawa ke dalam masyarakat menjadi sebuah kebiasaan yang mulai dari karakter diri sendiri, karakter keluarga hingga pada keyakinan yang mereka percaya yaitu agama. Dari sekian banyak negara di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah agama dan aliran kepercayaan yang paling banyak dalam masyarakatnya. Selain dapat memengaruhi sikap dan karakter seseorang, agama juga dapat membentuk perilaku

serta kebiasaan masyarakat yang akan mereka bawa di manapun mereka berada. Sehingga sikap bawaan inilah yang akan berpadu dalam hubungan interaksi sosial di dalam masyarakat.

Dalam hubungan dengan masyarakat yang membawa karakter atau sikap bawaan ini, setiap individu memiliki sumbangsih untuk menciptakan kebiasaan baru. Saling menerima di antara masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang kuat karena hubungan yang harmonis, sikap toleransi dan saling menerima satu sama lain, saling memahami bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan namun sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Dari perbedaan inilah sebuah masyarakat akan menciptakan perpaduan kebudayaan atau yang biasa disebut akulturası budaya. Akulturası budaya adalah perpaduan antara dua budaya atau lebih yang menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama, sehingga budaya atau karakter bawaan dari masyarakat yang sebelumnya tidak ditinggalkan. Budaya yang dihasilkan masyarakat yang diyakini kebenarannya banyak sekali diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari mulai dari kebiasaan hidup, pola perilaku kelompok hingga pada pengaplikasian benda yang melengkapi kehidupan mereka, seperti yang diungkapkan oleh J.J Honingmann yang menjelaskan bahwa suatu kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu wujud ide, wujud aktivitas dan wujud benda (Handoyo, 2007:44).

Kebudayaan memiliki pengaruh dalam kehidupan suatu masyarakat, dimana kebudayaan bukan hanya tentang warisan, adat dan kebiasaan yang dihasilkan melalui cipta, karya, dan karsa namun juga sebagai kepercayaan, pedoman, dan keyakinan hidup masyarakat yang akan mewujudkan toleransi dalam hidup berdampingan. Dengan adanya toleransi maka akan tercipta harmonisasi untuk menjalani kehidupan. Toleransi yang diwujudkan dalam masyarakat tidak hanya sekadar menerima dan menghormati, tetapi wujud tertinggi toleransi

bahkan pada kebiasaan dan perlengkapan kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk bangunan.

Salah satu daerah yang masyarakatnya menjalankan interaksi sosial dan menciptakan sebuah kebudayaan, perpaduan kebiasaan kehidupan serta agama adalah Kota Kudus. Melalui wujud bangunan benda hingga makanan khas daerah setempat yang memiliki keunikan serta beberapa peraturan tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan perwujudan budaya Islam dan Hindu yang pada masa sebelumnya banyak mewarnai kehidupan masyarakat Kota Kudus. Kota Kudus yang merupakan kota terkecil di Jawa Tengah memiliki keunikan tersendiri dalam segala aktivitas masyarakatnya sebagai wujud akulturasi budaya yang juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari jaman dahulu hingga sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akulturasi budaya islam dan hindu sebagai wujud harmonisasi agama yang ada di sekitar wilayah menara kudus dan bagaimana penerapan akulturasi budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena menunjukkan adanya deskripsi terhadap akulturasi budaya yang dihasilkan agama islam dan hindu di sekitar menara kudus serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sutopo menyatakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan tingkat kedua, yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif (2002: 110). Peneliti mulai memprediksi variabel-variabel yang terlibat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode yang memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang situasi yang terjadi saat sekarang berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari: informan, observasi, dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yakni terdiri dari empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan sebagai sebuah wujud dari perpaduan antarkebiasaan yang ada di dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang diwujudkan melalui kebiasaan masyarakat, adat istiadat, hingga diwujudkan melalui simbol bangunan tempat peribadatan terutama mereka masyarakat yang memiliki lebih dari satu keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. E. B Tylor (1871) menyatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, karsa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam:

1. kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan
2. kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan

3. benda-benda sebagai karya manusia (Koentjaraningrat, 1974: 83).

Kota Kudus adalah salah satu di Jawa Tengah yang memiliki perkembangan cukup pesat mulai dari industri hingga perkembangan budayanya. Kota Kudus memiliki tempat wisata sekaligus tempat religius yang merupakan bagian dari cerita wali songo (sembilan wali) yang cukup menarik wisatawan untuk datang. Bukan hanya sebagai tempat wisata, hal yang menarik yaitu diwujudkan melalui akulturasi kebudayaan antara Hindu dan Islam yang diwujudkan melalui bentuk bangunan, tempat peribadatan, makanan khas dan kebiasaan masyarakat sekitar yang sampai saat ini menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masing-masing agama yang dijaga dan dihormati sebagai kekayaan daerah. Akulturasi budaya masyarakat yang berbasis Islam dan Hindu dapat dilihat dari sub-sub budaya dibawah ini:

a. Seni dan adat istiadat

Di antara kegiatan seni dan adat istiadat penduduk sekitar Menara Kudus dimana terdapat banyak mayoritas Islam dan Hindu yang hidup berdampingan kerap dilangsungkan acara melalui kegiatan keagamaan antara lain pada saat idul *adha* dimana simbol perayaan biasanya ada penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh umat Islam namun kepercayaan warga Kudus hingga saat ini pantang untuk menyembelih sapi. Hal ini dikarenakan sapi merupakan hewan yang disucikan bagi masyarakat Hindu dan sebagai wujud penghormatan dan toleransi umat beragama maka di Kudus penyembelihan sapi dilarang. Kebiasaan ini terus dilakukan turun temurun hingga sekarang, dan tidak heran jika jarang ditemukan peternak bahkan penjual sapi di Kabupaten Kudus, jikalau ada hanya sedikit.

b. Arsitektur bangunan dan tempat peribadatan

Dari semua jenis akulturasi budaya Islam dan Hindu yang terjadi di Kota Kudus terutama sekitar Menara Kudus adalah

simbol bangunan. Bangunan menjadi hal yang sangat penting ketika bangunan tersebut dapat dilihat sebagai bukti telah adanya akulturası antara dua budaya yang ada di masyarakat. Akulturası dalam wujud bangunan yang ada yaitu Masjid Al-Aqsha yang ada di sebelah Menara Kudus yang menggunakan desain bangunan candi mulai dari pintu masuk hingga pada bangunan di dalam Masjid yang memiliki pintu-pintu terbuat dari tumpukan batu yang disusun menyerupai candi, dan yang paling jelas terlihat adalah bangunan yang terkenal yaitu Menara Kudus yang bentuknya persis dengan candi mulai dari bawah hingga atas bangunan yang disusun secara berundak dengan jalan masuk seperti candi pada umumnya dan memiliki puncak diatas bangunan yang semua sisinya merupakan bentuk candi. Menara tersebut digunakan seperti halnya menara yang lain yaitu untuk pusat sumber suara dan pemberian informasi kala itu. Semuanya menyerupai candi, dimana kita semua ketahui bahwa candi bagi umat Hindu biasanya digunakan sebagai tempat peribadatan mereka dan sebagai tempat yan disucikan. Begitupula umat Islam mewujudkannya sebagai suatu rasa penghormatan yang tinggi, toleransi antarumat beragama yang tidak lagi sekadar menerima keberadaan satu sama lain tetapi hingga pada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, turun temurun dan dijaga kelestariannya.

Nama masjid itu tercatat dalam sebuah prasasti yang terpasang di bagian atas mihrab. Tulisan pada batu itu menyebutkan bahwa masjid itu bernama Al Aqsha di negeri Al Quds. Bunyi prasasti selengkapnya yaitu “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Telah mendirikan masjid Al Aqsha ini dan negeri Al Quds (Kudus), khalifah dari keturunan Nabi Muhammad untuk membeli kemuliaan surga yang abadi, qurban untuk Ar Rahman dinegeri Al Quds (Kudus). Di ambang masjid terdapat

sebuah piagam yang dipahat pada batu. Ditulis dengan menggunakan huruf arab yang menunjukkan tanggal berdirinya bangunan yaitu 28 Rajab 956 atau 22 Agustus 1549 Masehi.

c. Makanan Khas dan Kebiasaan Sosial

Setiap daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tempat yang lainnya. Perbedaan dapat terjadi dan dilihat dari beraneka ragam adat, kebiasaan hingga pada kebiasaan sosial dan makanan khas. Begitupula yang terjadi di sekitar Menara Kudus, memiliki makanan khas berupa soto namun jika kebanyakan soto dengan daging ayam atau sapi, mungkin hanya akan ditemukan di Kudus yaitu soto dengan daging kerbau. Seoperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sapi merupakan hewan yang disucikan bagi umat agama Hindu, sehingga penghormatan itu tidak hanya sekadar kita dilarang menyembelih sapi bahkan hingga pada dilarang memakan dagingnya. Toleransi yang dilakukan oleh umat agama Islam jelas sangat besar demi terwujudnya harmonisasi antarumat beragama. Bahkan kebiasaan tersebut tidak hanya berlaku di sekitar Menara Kudus tetapi seluruh penjuru Kota Kudus.

Tidak hanya melalui makanan khas, namun juga kebiasaan sosial dan komunikasi sosial di mana kegiatan sehari-hari masyarakat sekitar Menara Kudus melakukan interaksi sosial dengan melaksanakan kegiatan seperti ajaran agama masing-masing namun tidak pernah bersinggungan dengan agama lain. Setiap masyarakat berhak melaksanakan ibadah, kegiatan keagamaan dan kegiatan yang lain tanpa mengganggu dan merasa terganggu dengan aktivitas masyarakat yang lain. Kebiasaan ini seperti tempat bangunan peribadatan keturunan china atau tionghoa yang mendirikan Klenteng sebagai tempat peribadatan mereka bersebelahan dengan kompleks Menara Kudus yang sangat kental keislamannya, bahkan ketika semua agama sibuk

menjalankan aktivitas keagamaan masing-masing tidak ada yang saling bersitegang atau berkonflik karena toleransi yang tertanam dalam diri masing-masing sangat kuat sebagai masyarakat yang memiliki adab dan kewajiban saling menghormati sebagai negara yang multikultural dan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga jelas tidak ada perselisihan antarumat beragama lagi sekalipun tempat ibadah mereka bersebelahan.

KESIMPULAN

Akulturası budaya yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sekitar Menara Kudus diwujudkan melalui bentuk bangunan tempat peribadatan dan beberapa arsitektur bangunan yang saling menggunakan desain perpaduan antara islam dan hindu serta tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang mengharuskan antarumat beragama saling menghormati peraturan dari masing-masing agama sebagai wujud harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI di tengah guncangan yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Perwujudan harmonisasi agama sangat beragam, tidak selalu harus menggunakan tradisi orang lain atau menggunakan cara dari agama lain, tetapi juga dapat dipadukan dalam sebuah akulturası budaya yang merupakan perpaduan dua agama sehingga hubungan antaragama dapat terjalin dengan harmonis sebagai wujud penerapan nilai Pancasila. Harmonisasi agama sangat penting agar masyarakat dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara sesuai tujuan bangsa Indonesia serta agar masyarakat merasa memiliki, menjaga, melestarikan budaya dari daerah mereka sendiri, bahwa hidup rukun

berdampingan dapat mewujudkan iklim bangsa yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat.

Saran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah menjaga kelestarian budaya sangatlah penting, bahwa setiap masyarakat yang menghargai kebudayaan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Sesuai dengan amanat Pancasila bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa kita meyakini bahwa setiap agama mengajarkan untuk beribadah sesuai koridor agama masing-masing tanpa perlu mengganggu sesama, dan menurut UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum juga negara yang menjamin masyarakatnya termasuk dalam hal peribadatan sesuai agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: FIS Unnes.
- Koentjaraningrat. 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

REINTERNALISASI PANCASILA DAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN RADIKALISASI DI PERGURUAN TINGGI

Wachid Pratomo

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: putrienz37@gmail.com

Abstrak

Radikalisasi dewasa ini telah menjadi hal menakutkan bagi bangsa Indonesia, dikarenakan dari tahap inilah akan muncul terorisme yang membahayakan negara. Lebih mengkhawatirkan lagi, radikalisme sudah menyusup ke wilayah pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Ada berbagai cara yang digunakan dalam meradikalkan mahasiswa. Salah satunya melalui Lembaga Dakwah Kampus yang merekrut dan mendoktrin para anggota menjadi radikal. Reinternalisasi Pancasila dan agama menjadi salah satu benteng dalam upaya mencegah semakin meluasnya radikalisasi di kampus yang menasar para mahasiswa sebagai harapan bangsa. Selain hal itu juga harus mengaktifkan kembali Panca Dharma perguruan tinggi, memaknai kembali Pancasila sila demi sila secara benar, serta mengoptimalkan ajaran Ki Hadjar Dewantara melalui Tri Pusat Pendidikan. Dengan begitu radikalisme di lingkungan perguruan tinggi akan sedikit ditekan perkembangannya.

Kata Kunci: Reinternalisasi Pancasila, Radikalisme, Tri Pusat Pendidikan.

PENDAHULUAN

Di era reformasi yang memberi ruang keterbukaan dan kebebasan sekarang ini, dalam masyarakat sekarang ini, dalam masyarakat Indonesia telah muncul berbagai gerakan Islam yang cukup radikal. Pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran “normal” tergolong sangat kasar misalnya menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma, Pancasila, dan agama mereka. Kita mengenal Indonesia sebagai negara pluralis, tempat kemajemukan hadir dan berkembang. Sebut saja, suku, ras, budaya, bahkan agama. Kemajemukan yang terjadi di Indonesia pun tidak terlepas dari kemajuan di berbagai bidang ilmu yang menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan itu telah membawa akibat yaitu adanya perjumpaan yang semakin intensif antar kelompok-kelompok manusia. Salah satunya adalah pergesekan yang seringkali terjadi di antara agama-agama yang berbeda. Ketika keyakinan terhadap suatu agama itu cenderung dimutlakan maka akan sangat berpotensi pada timbulnya pergesekan atau ketegangan. Apabila hal itu tidak segera diatasi maka semakin lama akan terjadi benturan yang mengakibatkan terpecah belahnya serta kerusakan-kerusakan kehidupan manusia serta mengancam kemajemukan yang telah ada.

Ketika memfokuskan pada agama, maka sesungguhnya ada fenomena yang menarik dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Fenomena menarik karena sebagian besar masyarakat Indonesia senantiasa mengondisikan dirinya dalam hubungan mayoritas-minoritas, apalagi ketika hal itu dikaitkan dengan urusan agama. Hal itu sudah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa yang panjang serta pengalaman-pengalaman konkret yang hadir dalam realitas masyarakat Indonesia. Realitas itu nampak kembali melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kini tengah dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan

dan teror. Aksi tersebut telah menyedot banyak potensi dan energi kemanusiaan serta telah merenggut hak hidup orang banyak termasuk orang yang sama sekali tidak mengerti mengenai permasalahan ini. Meski berbagai seminar dan dialog telah digelar untuk mengupas persoalan ini yaitu mulai dari pencarian sebab hingga sampai pada penawaran solusi, namun tidak juga kunjung memperlihatkan adanya suatu titik terang. Fenomena tindak radikalisme dalam agama memang bisa dipahami secara beragam, namun secara esensial, radikalisme agama umumnya memang selalu dikaitkan dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Dengan demikian, adanya pertentangan, pergesekan ataupun ketegangan, pada akhirnya menyebabkan konsep dari radikalisme selalu saja dikonotasikan dengan kekerasan fisik. Radikalisme lebih mengerikan karena telah memasuki wilayah pendidikan terutama kampus yang menjadi ladang tempat perekrutan pemikiran radikal di Indonesia. Ada segelintir orang ingin mendirikan suatu negara dengan basis agama padahal negara Indonesia adalah negara yang berpancasila. Pancasila sebagai sumber nilai yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga menjadi landasan moral dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. (Komalasari, 2007:47). Dengan begitu sangat meresahkan jika tindakan radikalisme di kampus dibiarkan karena lambat laut akan menjadi teroris yang akan mengulingkan negara.

PEMBAHASAN

Radikalisme Hadir Ketika Pancasila Tersingkir dan Agama Ditafsirkan Sendiri

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari

perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik. Karena apapun Indonesia memiliki 6 agama yang disimpulkan dengan ikatan persaudaraan. Kebhinekaan adalah aset nasional, suku-suku bangsa yang bersatu menjadi bangsa Indonesia adalah modal dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus landasan dan modal pembangunan (SES, 2017:48). Selain kebhinekaan yang ada, Indonesia memiliki *Philosophische Gronslag* dikenal dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kompromi, persetujuan yang indah dan wujud harmonisasi, secara langsung, antara kelompok yang mengatasnamakan wakil masyarakat muslim yang menghendaki dasar Islam dengan kelompok nasionalis yang mengedepankan dasar kebangsaan dan secara tak langsung, antara mayoritas dengan minoritas dengan begitu tidak lagi diperdebatkan antara pancasila dan agama, malah pancasila dan agama merupakan benteng kuat penjaga negara Indonesia. (Ulyas, Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan STAIN Kudus 2016)

Kemunculan Radikalisme

Radikal itu sendiri berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar (pohon) Dan fundamentalisme bermakna dasar dan inti, fundamentalisme islam dengan demikian adalah dasar dan inti ajaran islam. Gerakan ini dapat berada di wilayah akademik, politis, bahkan ekonomis. Fundamentalis dengan radikal memang saling berkaitan, keduanya memiliki kesamaan arti yang sama-sama bermakna inti, kelompok radikalisme muncul dengan dilandasi paham fundamentalis. Sesungguhnya, sejarah munculnya fundamentalisme apabila di lacak secara akademis baru tumbuh sekitar abad ke-19 dan terus mengemuka sampai sekarang. Dalam tradisi barat sekuler hal ini di tandai keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif di satu sisi

tetapi negatif di sisi yang lain. Apa yang negatif, yaitu munculnya perasaan kekosongan jiwa, kemurungan hati, kehampaan, dan ketidakstabilan perasaan.

Latar Belakang Tindakan Radikalisme di Indonesia

Radikalisme yang seringkali dibungkus dengan aliran agama, ternyata masih mewarnai tindakan terorisme di Indonesia. Kasus bom bunuh diri (bom di Mariot Dubes Australia, Bom Bali I & II dan yang lainnya), konflik yang berbau sentimen agama di Poso, Maluku, dan yang lainnya, semakin memperjelas bahwa adanya korelasi antara radikalisme di masyarakat dengan doktrin agama. Namun, apakah memang radikalisme yang menyebabkan timbulnya terorisme di Indonesia itu memang terjadi karena doktrin ideologi tertentu? Beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan radikalisme di Indonesia.

Faktor Kemiskinan

Dalam kacamata intelektual kampus, radikalisme yang berbasis kelompok agama terkait erat dengan kemiskinan. Selama kemiskinan masih melekat dalam irama kehidupan rakyat, radikalisme akan beranak pinak. Pandangan tersebut, memang sangat realistis dengan kenyataan yang terjadi. Hal itu bisa dilihat dari berkembangnya radikalisme di seluruh pelosok dunia, ternyata lebih marak terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Bentuk radikalisme tersebut sering terjadi dalam bentuk pemberontakan sebagian masyarakat yang kecewa terhadap pemerintahannya yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menyimpannya. Di negara-negara maju sangat jarang terjadi radikalisme dengan latar masalah ekonomi (kemiskinan). Meskipun di negara maju tidak sepenuhnya bersih dari tindakan radikalisme, namun motif radikalisme di negara maju mempunyai latar belakang yang berbeda

dengan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan bahwa timbulnya kekufuran (termasuk radikalisme masyarakat) itu bisa terjadi karena kemiskinan. Karena pada dasarnya kemiskinan bisa menyebabkan manusia untuk berbuat kufur. Keadaan rakyat Indonesia sampai dengan saat ini masih dililit dengan problem kemiskinan. Bank Dunia memperhitungkan 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Kondisi Indonesia seperti ini memang sangat rentan timbulnya radikalisme. Menurut kalangan intelektual kampus untuk menghentikan radikalisme di masyarakat perlu ada usaha dari seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran ulama dan pemerintah sangat penting dalam melakukan misi suci ini. Ulama (da'i dan para guru/dosen) bisa terus mengarahkan masyarakat dan para siswa/mahasiswanya, untuk menciptakan masyarakat dan generasi mudanya, untuk mengasah bakat di suatu bidang (profesional) dan berbuat jujur dalam bidangnya. Begitu juga pemerintah sebagai pelayan masyarakat, harus bisa menciptakan iklim perekonomian yang stabil. Dengan semua usaha itu, masyarakat Indonesia bisa terhindar dari problem kemiskinan yang berkepanjangan. Radikalisme pun akan bisa diminimalisasi.

Faktor Kebodohan

Keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan intelegensi dan pengetahuan bagi warga yang kurang mampu. Mereka tidak akan cukup dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Juga akan lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari pihak lain. Termasuk juga akan mudah diprovokasi oleh paham-paham radikal. Hal ini dianggap oleh sebagian besar orang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam merealisasikan program-program pendidikannya. Program wajib belajar 9 tahun misalnya, mungkin bagi sebagian masyarakat masih terjangkau untuk dipenuhi. Namun bagi rakyat miskin, program tersebut cukup sulit untuk dipenuhi. Karena bagi

mereka mempertahankan kelangsungan hidup lebih penting, sehingga kebutuhan akan pendidikan mereka sampingkan. Meski pemerintah juga telah memberikan fasilitas dana BOS bagi setiap siswa di Indonesia, namun dana yang diberikan itu belum cukup untuk membayarkan biaya-biaya tambahan yang sering dibebankan oleh sekolah. Seperti biaya tunjangan pembangunan, sarana prasarana, les tambahan, buku pelajaran, dll. Parahnya lagi, marak terjadi kasus-kasus penyelewengan dana BOS oleh oknum-oknum tertentu yang berakibat tidak tersalurkannya hak para siswa. Maka dari itu, sudah jadi hal maklum jika banyak generasi muda saat ini tidak banyak mengenyam pendidikan dan sudah tentu menjadi tugas pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat untuk membela rakyat-rakyat kecil. Sehingga akan tercapai kesejahteraan sosial yang lebih merata. Selain itu, tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya saja mengenai ajaran jihad. Jihad sendiri berasal dari kata arab artinya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dalam rangka beribadah mencari ridho Allah. Namun ada beberapa kelompok yang terus saja memaksakan paham bahwa jihad dalam Islam yang hukumnya wajib haruslah dipenuhi dengan berperang. Padahal sesungguhnya jihad di zaman ini tidak harus selalu dengan cara berperang, namun bisa berupa usaha mencari nafkah secara halal demi keluarga. Generasi muda mencari ilmu demi masa depannya. Seorang pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan. Jadi jihad itu banyak macamnya bukan dengan terror dan aksi bom bunuh diri karena itu makin mengotori wajah Islam di mata dunia.

Faktor Politik

Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita semua negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dari luar. Namun

sebaliknya jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok-kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya. Bukankah kita pernah membaca sejarah lahirnya gerakan khawarij pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA. yang merupakan maskot gerakan terorisme masa lalu yang juga disebabkan oleh munculnya stigma ketidakstabilan dan ketidakadilan politik pada waktu itu. Sehingga muncullah kelompok-kelompok yang saling mengklaim paling benar, bahkan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Tentu kita tidak ingin sejarah itu terulang kembali saat ini.

Faktor Pendidikan

Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada ummat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sementara sekolah umum alergi memasukan kurikulum agama. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau

dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

Faktor Psikologis

Faktor ini sangat terkait dengan pengalaman hidup individual seseorang. Pengalamannya dengan kepahitan hidupnya, lingkungannya, kegagalan dalam karir dan kerjanya, dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung akibat kegagalan hidup yang dideranya, mengakibatkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pembinaan dan bimbingan yang tepat. Orang tersebut akan melakukan perbuatan yang melanjutkan sebagai reaksi untuk sekadar menampakkan eksistensi dirinya.

Proses Masuknya Paham Radikal ke dalam Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki banyak keanekaragaman potensi yang dimiliki setiap perorangnya. Baik itu bakat, keahlian, pengetahuan, kepemimpinan, dan intelektual. Di samping itu sebenarnya mahasiswa masih mencari ke arah mana orientasi masa depan yang akan ditempuh. Sehingga mereka masih memerlukan beberapa pengaruh yang dapat menunjang dan memfasilitasi prinsip dan jati diri yang sedang dicari. Oleh sebab itulah, ada beberapa kelompok radikal yang memanfaatkan kondisi mahasiswa yang masih labil untuk dipengaruhi dengan konsep radikalisme yang mereka bawa. Padahal sejatinya konsep radikalisme tidak sepenuhnya mengarah pada kekerasan, pemaksaan, ataupun menjurus hal-hal yang negatif. Generasi muda yang masih penuh gairah dalam menuntut ilmu tentulah sangat membanggakan. Apalagi jika dapat meraih suatu prestasi atau aktif dalam berbagai organisasi yang nasionalis yang barang kali bisa memfasilitasi rasa nasionalisme pada bangsa ini.

Namun kejadian belakangan ini sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kasus terjadinya bom buku di Utan Kayu tanggal 15 Maret 2011 yang sasarannya adalah Ulil Absar Abdala, anggota

Jaringan Islam Liberal, sampai temuan terakhir tanggal 26 April 2011, ditemukannya bom di pintu air cililitan. Kasus Gafatar yang menyedot perhatian masyarakat dan NII juga memperpanjang daftar panjang radikalisme di kampus karena sebagian besar yang terseret di dalamnya adalah mahasiswa perguruan tinggi. Kegiatan teror dan radikal ini meresahkan berbagai kalangan masyarakat. Yang mengejutkan banyak pihak, ternyata sebagian besar pelaku bom buku dan perencana bom Serpong merupakan lulusan perguruan tinggi, bahkan diantaranya lulusan perguruan tinggi Islam. Pelaku jelas-jelas menunjukkan pemahaman keagamaan Islam dengan cara sempit, bercorak eksklusif, dan keras. (Lutfi Zanwar Kurniawan, 2011) Ada lagi kejadian yang menyebutkan sebelas mahasiswa menghilang di Malang, Jawa Timur. Kemudian muncul kabar adanya peristiwa penyekapan mahasiswa di Universitas Diponegoro Semarang. Kampus dan mahasiswa seakan menjadi lahan dan sasaran utama kelompok radikal untuk merekrut anggotanya. (Radar Lampung, 05/05/ 2011) Kampus yang selama ini dikenal sebagai tempat persemaian manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa imun terhadap pengaruh ideologi radikalisme. Radikalisme menyeruak menginfiltrasi kalangan mahasiswa di berbagai kampus. Dari masa ke masa di lingkungan kampus hampir selalu ada kelompok radikal baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kasus seperti di atas dapat ditemukan dalam skala berbeda di banyak perguruan tinggi. Beragam penelitian dan pengakuan mereka yang keluar dari sel-sel radikal dan ekstrim mengisyaratkan, mahasiswa perguruan tinggi umum lebih rentan terhadap rekrutmen daripada mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Gejala ini jelas berkaitan dengan kenyataan bahwa cara pandang mahasiswa perguruan tinggi umum khususnya bidang sains dan teknologi, cenderung hitam putih. Sedangkan mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang mendapat keragaman perspektif tentang islam cenderung lebih terbuka dan bernuansa (Azyumardi Azra, Kompas, 27/4/11). Radikalisme juga muncul dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang belakangan ini mulai menjadi sasaran pembibitan calon pemikir radikal yang tentu sangat membahayakan, tentu kita masih ingat baru-baru ini beberapa

LDK di kampus UIN, IAIN, STAIN dan beberapa kampus negeri lainnya tengah menjadi sorotan tajam masyarakat karena di tempat inilah muncul pikiran radikal akibat salah mempelajari agama atau ilmu dan kondisi jiwa yang mudah terpengaruh ajakan yang terkadang menyesatkan.

Modus perekrutan yang biasa dilakukan oleh jaringan tersebut secara umum seperti berikut:

1. Mengajak dengan alasan menemui teman yang baru kembali dari Timur Tengah atau teman yang mendapat pencerahan lewat seminar tentang bangkitnya Islam.
2. Mengajak dengan alasan mencarikan kerja.
3. Mengajak ke rumah teman atau semacamnya.
4. Setiap jamaah memiliki target 10 orang untuk dihadirkan setiap bulan, umumnya teman kuliah, SMU, SMP dan SD.
5. Bagi perekrut tanpa target, umumnya "hunting" di kampus-kampus, mal dan toko buku.
6. Semua modus berakhir di Malja (kantor/markas) dan proses doktrinasi akan dilakukan di dalam kamar tertutup.
7. Pemberi materi seorang laki-laki, umumnya seorang Mas'ul (pimpinan).
8. Menyamakan persepsi soal 'musuh', menimbulkan rasa kebencian, membangkitkan rasa kemarahan
9. Obrolan/diskusi isu terkini atau isu lama soal kekejaman yang diterima umat

Selain itu dalam usaha perekrutannya, jaringan NII memiliki beberapa karakteristik yang bisa dikenali:

- a) Untuk merekrut menggunakan dua orang jamaah, satu orang pemancing dan lainnya pengajak.
- b) Pemancing bertugas mengawasi dan mengawal serta memotivasi calon jamaah.
- c) Pemancing berpura-pura sebagai calon jamaah.
- d) Pemancing dan pengajak mengawal calon jamaah hingga tahap hijrah, termasuk menginap di rumah calon jamaah dan pencarian dana untuk sedekah hijrah.

e) Umumnya perekrut melakukan *screening* lewat dialog tentang gerakan sesat untuk mengukur pengetahuan calon jamaah tentang NII.

f) Yang dihindari oleh perekrut adalah anak polisi dan anak TNI.

Jika seorang mahasiswa telah terpengaruh oleh paham seperti itu dan telah berhasil direkrut oleh jaringan NII, dia akan terjebak dengan banyak kewajiban dan kepentingan. Misalnya saja seperti kewajiban menyeter dana setiap hari. Hal ini tentu akan memaksa mereka melakukan tindakan kriminal pada lingkungannya. Mencuri dari orang di luar kelompok, menipu orang tua dengan alasan menghilangkan *laptop*, HP, merusakkan barang teman, membantu operasi orang tua teman, dll. Pada akhirnya, yang mereka hadapi hanyalah tindakan yang merugikan orang banyak dan diri sendiri. Perkuliahan pun rela mereka tinggalkan hanya untuk menjalani aliran yang tak berpedoman secara benar kepada syariat-syariat Islam sesungguhnya.

Harmonisasi Pancasila dan Agama Islam

Saat ini ada segelintir orang yang mencoba mengganti Pancasila karena dirasakan tidak sejalan dengan Agama Islam khususnya kitab Alquran. Padahal jika kita runtut satu per satu sila Pancasila akan ada titik temu hubungannya dengan ayat Alquran. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai *Grundnorm* dalam konsep hukum Islam. Untuk itu diulas serta dianalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Alquran. Menurut Fokky Fuad dalam jurnal Islam dan Ideologi Pancasila membuat sebuah runtutan antara sila Pancasila dan ayat Alquran yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa, Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan (monoteisme yang ketat). Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berlangsung selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan Yang Maha Esa diakui atau tidak merupakan sumbangsih besar Ideologi Islam terhadap Ideologi Pancasila. Islam menolak konsep Ketuhanan politeisme, Islam hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah Swt. sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan

selain Allah Swt. 7 hal ini begitu jelas dan tegas sesuai firman Allah dalam Alquran: *“Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa”* (Qs.an-Nahl [16]: 22), *“Dan Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan, hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa (Qs.an-Nahl [16]: 51).*

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Swt. yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Alquran Surah an-Nahl [16]:90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran”*. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui Keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan *hablum minallah* dan *hablum minanas* dalam ideologi Pancasila.

Sila Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Swt: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”* (Qs. al-Hujurat [49]:13).

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan, sesuai dengan firman Allah: *“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”* (Qs. Ali Imran [3]:159). Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika menerima pendapat para

sahabat. Bahkan sikap demokratis Beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Swt berfirman dalam Qs. Az-Zariyat [51]:19: *“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*. Dengan demikian setelah dijabarkan di atas ternyata nilai Pancasila memang berhubungan dengan Ayat Alquran sehingga tidak ada penyimpangan seperti apa yang dituduhkan selama ini.

Solusi Menangkal Perkembangan Radikalisme di Lingkungan Kampus

Efektifitas Tridharma perguruan tinggi

Perguruan Tinggi adalah suatu komunitas ilmiah. Suatu komunitas yang memiliki karakteristik akademik. Disinilah tempat di mana produk intelektual dilahirkan, dikembangkan dan diimplementasikan. Dengan kata lain perguruan tinggi merupakan laboratorium bagi masyarakat, yang memberikan kontribusi bagi terciptanya proses pemberdayaan berpikir sesuai dengan khasanah ilmu dan kapasitas yang dimiliki untuk dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Esensi peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut tertuang ke dalam pola orientasi yang menjadi bagian dari kegiatan akademik atau yang biasa dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian). Berbicara tentang pendidikan, maka perguruan tinggi bukan hanya menciptakan suatu mekanisme kegiatan belajar-mengajar secara formal saja. Tetapi ia juga harus mampu menumbuh-kembangkan nilai di dalam pendidikan. Nilai yang dimaksud itu adalah bahwa di dalam pendidikan terdapat budaya dan etika yang harus dipegang. Karena pendidikan hanya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia.

Dalam konteks itulah maka pendidikan (khususnya di perguruan tinggi) harus setidaknya mengambil ikhtiar dari hakekat ilmu, yaitu dikaji secara ilmiah dan dianalisa secara kontekstual agar bermanfaat bagi individu, masyarakat bangsa dan negara. Berkaitan dengan pengaruh radikalisme yang belakangan ini menyeruak, maka perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam menangkal dampak negatif dari jaringan radikal. Sebagai garda depan dalam memantau perkembangan mahasiswa dari berbagai aspek, lembaga pendidikan ini diharapkan mempunyai orientasi yang jelas dan tepat dalam menanamkan nilai nasionalisme yang benar kepada mahasiswanya. Namun bukan hanya pihak lembaga pendidikan saja yang harus turut andil dalam menyikapi tuntutan tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memiliki tanggung jawab penuh, khususnya departemen pendidikan pada masalah ini. Sistem pendidikan yang kurang maksimal dan kurang mampu memfasilitasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan ajaran agama secara tepat menjadi celah bagi jaringan radikal untuk menyebarkan pemahamannya.

Kemudian melalui pendidikan agama, akan diarahkan dalam penguatan perspektif keagamaan-kebangsaan dan diorientasikan untuk penguatan sikap intelektual tentang keragaman agama serta toleransi intra agama dan antar agama serta antara umat beragama dengan negara. Sehingga mereka akan memiliki prinsip dan pandangan yang jelas dalam kehidupan berbangsa ini. Juga mereka akan mampu untuk lebih memilih dan memilah paham-paham radikal yang berkembang di masyarakat karena telah mempunyai pemahaman yang cukup berkaitan dengan korelasi agama dengan kenegaraan. Selain dari aspek kurikulum yang patut diajarkan di lingkungan kampus, perlu juga upaya pendorong agar organisasi yang terbentuk di perguruan tinggi lebih efektif diikuti oleh mahasiswa. Karena, dari lingkup organisasi inilah mahasiswa akan benar-benar terlatih untuk hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk. Dalam suatu masyarakat yang mempunyai beragam cara berinteraksi, memiliki berbagai macam ide kreatifitas, dan pandangan-pandangan mengenai permasalahan negara. Yang tentunya semua aspek tersebut dibimbing ke

arah yang positif dan bermanfaat. Sehingga mereka akan terlatih jiwa kepemimpinan, kemufakatan, dan nasionalisme kebangsaan.

Mengoptimalkan Peran Tri Pusat Pendidikan

Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara juga merupakan warisan leluhur yang patut diimplementasikan dalam perwujudan masyarakat yang berbudi pekerti. Pusat pendidikan budi pekerti berlangsung dalam tiga lingkungan pendidikan, yaitu dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat, yang kemudian disebut Tri Pusat Pendidikan (Saefudin dan Solahudin, 2009) :

- a) Lingkungan keluarga; pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan budi pekerti, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak-anak
- b) Lingkungan sekolah (termasuk kampus); melatih anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, di sekolah diberikan pelajaran budi pekerti, keagamaan, estetika, membenarkan atau salah, dan sebagainya.
- c) Lingkungan masyarakat; merupakan lingkungan setelah lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan diluar pendidikan sekolah.

Reinternalisasi Sila dalam Pancasila

Pancasila bukan agama. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah bagian dari ajaran agama. Menjadi pancasila semakin mendekatkan seseorang menjadi agamis. Menjadi agamis mendekatkan seseorang menjadi pancasilais. (Syahrin Harahap, 2017: 6). Hilangnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masyarakat Indonesia, merupakan pangkal dari munculnya berbagai tindakan radikalisme & terorisme di Indonesia. Contohnya sila pertama adalah

ketuhanan yang berkebudayaan baik. Radikalisme sendiri sebagai ekspresi ketuhanan yang tidak berkebudayaan. Radikalisme tumbuh akibat merosotnya nilai-nilai ketuhanan pada diri manusia. Idealnya, hubungan manusia dengan Tuhannya harus selaras dengan hubungan manusia dengan manusia. Sikap berketuhanan yang merupakan cermin sila pertama ini, secara langsung berhubungan dengan sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada fase yang lebih luas, radikalisme merupakan cerminan lumpuhnya sila ketiga: persatuan Indonesia. Bagaimana pun, kelompok radikal ini biasanya berada di lingkungan pergaulan yang sempit & tertutup. Sehingga memiliki ilmu dan pandangan yang terbatas. Daya permusyawaratan dan kepemimpinan yang buruk di negeri ini pun jadi penyebab munculnya beragam aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Para teroris umumnya memiliki jaringan dengan ingatan yang pedih. Terakhir, negara kurang mampu mewujudkan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Umumnya, ketimpangan sosial ini menghadirkan radikalisme di berbagai negara di belahan dunia. Kasus bom di Norwegia pun, merupakan hasil dari ketimpangan sosial di negara tersebut.

Pancasila sendiri sebagai sebuah titik keseimbangan dalam bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi acuan masyarakat untuk berkehidupan, tetapi juga alat ukur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pancasila merupakan solusi permasalahan radikalisme yang melanda Indonesia saat ini. Maka diharapkan nilai-nilai dalam Pancasila harus benar-benar dijalankan oleh masyarakat Indonesia guna mencegah dan meminimalisir radikalisme dan terorisme di negeri tercinta kita ini.

Mereinternalisasi Pancasila adalah cara yang sangat bijaksana disebabkan Pancasila di landasi teori falsafah sehingga yang paling bertanggung jawab dalam reinternalisasi dan masadepannya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah salah satu pengendali globalisasi, di samping perbankan dan manufaktur. Perguruan tinggi pengawal masyarakat Indonesia agar tidak gamang dalam mengharungi globalisasi dunia. Perguruan tinggi adalah basis manusia terpelajar (cendekiawan) yang bersifat independen. (Syahrin Harahap,

2017 : 4). Selanjutnya menurut Yudi Latif (2015: 57) prinsip Pancasila dalam upaya mewujudkan peri kehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur baik secara material dan spritual.

PENUTUP

Radikalisme di ruang lingkup masyarakat memang tak akan bisa secara total dikontrol dan diatur sedemikian rupa seperti yang kita kehendaki. Seperti aspirasi rakyat yang patut didengar oleh wakil-wakil rakyat di pemerintahan, sikap radikalisme juga merupakan ungkapan para pelakunya karena suatu sebab kondisi, kejadian, ataupun kebijakan yang berlangsung di negeri ini. Setiap jengkal masalah yang menjadi isu negeri ini bisa jadi penyulut sikap-sikap radikal untuk bangkit. Apalagi jika isu tersebut berkaitan dengan masalah politik dan sosial. Sama halnya dengan kalangan mahasiswa. Dalam perjalanannya menuju kedewasaan tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih mencari jati diri dan prinsip hidup. Mereka yang dapat dikatakan masih labil acap kali mudah tersulut emosi dan mudah dipengaruhi pikiran-pikiran lingkungannya. Untuk itulah perlu diberikan wadah yang tepat bagi masa peralihan generasi muda ini untuk membentuk pribadi yang kelak memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi demi terhindar dari pengaruh-pengaruh sesat yang berkembang di masyarakat. Dengan diselenggarakannya pembelajaran Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan agama, juga efektifitas kegiatan organisasi yang diberikan maka sudah tentu mahasiswa akan memiliki karakter yang mulia sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu internalisasi kembali Pancasila dan agama perlu dikembangkan didukung dengan efektifitas panca dharma serta tri pusat pendidikan agar generasi muda Indonesia terhindar dari virus radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadlal, dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Komalasari, K. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Lentera Cendekia.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Mohammad Nasir Abbas. 2017. *Jaringan Terorime di Indonesia dan Pola Rekrutmen*. Yogyakarta: UIN.
- Saefudin, A. Azis dan M. Solahudin. 2009. *Menuju Manusia Merdeka Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Leutika.
- Sri Edi Swasono. 2017. *Pancasila di Kampus Taman Siswa*. Yogyakarta. UST Press.
- Syahrin Harahap. 2017. *Reinternalisasi Pancasila*. Yogyakarta.
- Fokky Fuad, Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika, jurnal *Lex Jurnalica*, Vol. 9 No. 3, Desember 2012, hal. 166. Diakses tanggal 12 November 2017.
- Lutfi Zanwar Kurniawan. 2011. *Bom di Indonesia*. Diakses dari hmimpofeuui.blogspot.com. Diakses pada tanggal 10 November 2017.
- Ulyas. 2016. Pancasila Simbol Harmonisasi Antarumat Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan STAIN Kudus*. Diakses tanggal 11 November 2017.
- Azyumardi Azra. 2011. *Mencegah radikalisasi*. Kompas. Diakses tanggal 9 November 2017.
- www.radarlampung.com diakses tanggal 9 November 2017.

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mutiara Nurmanita

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
mutiara.nurmanita@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan nilai-nilai pancasila melalui pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Atas dikarenakan pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kalangan siswa dikalangan atas yang masih belum memahami pancasila bahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga banyak siswa yang melakukan tindakan atau perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai pancasila. Seperti kurang menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama bahkan ras yang menyebabkan sering terjadi perdebatan. Perdebatan sering menimbulkan konflik baik secara lisan maupun fisik. Tentu saja perilaku tersebut kurang mencerminkan nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila perlu dikembangkan dan ada dalam pembelajaran PPKN untuk siswa di Sekolah Menengah Atas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dari jurnal maupun buku. Hasil penulisan menunjukkan bahwa nilai-nilai pancasila dapat dikembangkan dalam pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Atas antara lain sebagai berikut. *Pertama*, sila pertama yaitu siswa diberikan pemahaman arti penting memiliki agama. *Kedua*, sila kedua yaitu siswa dapat menghargai dan menghormati perbedaan. *Ketiga*, sila ketiga yaitu siswa mengaplikasikan perbedaan agama dan ras. *Keempat*, sila keempat yaitu siswa melakukan musyawarah terhadap perbedaan pendapat. *Kelima*, sila kelima yaitu siswa memperlakukan teman yang berbeda agama dan ras secara adil. Ke semua

sila tersebut dapat diterapkan kepada siswa SMA melalui pembelajaran PPKn.

Kata kunci: *Nilai-nilai Pancasila, Pengembangan Nilai Pancasila, Pembelajaran PPKn*

PENDAHULUAN

Warga negara yang hidup dalam masyarakat mempunyai kontribusi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang besar memiliki potensi warga negara yang cerdas dan berkompeten. Tidak dapat dipungkiri jika dalam berbagai kehidupan memerlukan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Peraturan terkadang hanya dimaknai sebagai aturan yang hanya untuk kalangan yang mempunyai kewajiban dan terkadang banyak masyarakat yang kurang memaknai arti peraturan. Peraturan dibuat agar masyarakat tahu akan hak dan kewajiban sebagai warga negara terutama remaja. Remaja yang sangat berperan dalam hal generasi sebuah kemajuan bangsa. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan remaja seperti tawuran yang sangat meresahkan masyarakat.

Tawuran terjadi pada saat peringatan HUT RI ke-71 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pelajar terlibat tawuran yang bertepat di depan kantor walikota pada hari Rabu 17 Agustus 2016. Pelajar membawa bambu runcing. Tidak hanya itu saja, pelajar juga membawa pecahan botol untuk dilemparkan di kantor walikota tersebut (Widiatmaka, 2016: 189). Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan bahwa remaja yang masih berstatus sebagai pelajar melakukan tindakan yang sangat mencoreng adab bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri di zaman yang serba modern ini banyak sekali pengaruh negatif dari berbagai budaya luar yang cepat dan mudah masuk ke budaya Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya

proses filter terhadap budaya yang kurang sesuai dengan budaya asli Indonesia.

Budaya luar akan berpotensi untuk menghancurkan nilai luhur bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila akan mudah terancam dengan adanya pengaruh globalisasi yang semakin merajalela di negeri ini (Damanhuri, dkk., 2016: 186). Pengaruh globalisasi perlu diatasi dengan salah satu mata pelajaran, hal tersebut dapat menjadikan warga negara mampu menghindari pengaruh negatif dari globalisasi. Salah satu mata pelajarannya yaitu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di mana mata pelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai pancasila seperti penegakan HAM, identitas nasional sebagai ciri khas bangsa, dan proses untuk menuju masyarakat madani (Erwin, 2011: 3).

PPKn juga berupaya untuk menjadikan siswa untuk terampil dalam mengelola nilai-nilai yang tidak hanya dimaknai akan tetapi dilaksanakan. Selain itu, siswa perlu mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui masyarakat yang demokratis (Banks, 2008: 135). Kenyataannya banyak siswa yang kurang begitu tertarik dengan mata pelajaran ini dikarenakan sangat membosankan dan hanya mementingkan hafalan sehingga siswa tidak termotivasi untuk bertanya. Alasan selanjutnya juga disebabkan minimnya pengetahuan guru terhadap model pembelajaran yang dapat diinovasi menjadi lebih baik dan interaktif (Wardana, 2013: 55).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan. Sumber-sumber yang didapat dari jurnal dan buku dianalisis dan dilakukan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia mempunyai peran dalam kemajuan sebuah bangsa. Pancasila yang ada haruslah bersifat terbuka kepada masyarakat dan bersifat relevan dengan perkembangan zaman walaupun pengetahuan manusia yang selalu berkembang. Pengetahuan tersebut menjadi ideologi masyarakat dalam menjalankan aturan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sukadi, 2013: 197). Nilai-nilai pancasila yang ada terdapat dalam sila-sila pancasila yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya nilai-nilai dalam ketuhanan yang berarti kehidupan harus disesuaikan dengan aturan dari Tuhan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi keyakinan dan kepercayaan bahwa dalam hidup harus berbuat baik kepada semua orang.

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya dalam hidup harus bersikap adil pada siapa pun tanpa terkecuali. *Ketiga*, Persatuan Indonesia. Artinya walau masyarakat berbeda dan beragam tentu saja harus tetap bersatu atau lebih dikenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika*. *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Artinya setiap warga negara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal baik keadilan dan aturan dalam bermasyarakat. *Kelima*, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya keadilan harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat (Tjiptabudy, 2010: 3-4).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PPKn sebagai sebuah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik dan tahu akan hak dan kewajibannya (Rusminiyati, 2007: 125). PPKn sebagai mata pelajaran yang mempunyai tujuan untuk menjadikan warga negara yang cerdas, mampu

berdemokrasi, memiliki tanggung jawab kepada bangsa (Winataputra, dkk, 2009: 11). Selanjutnya PPKn memiliki fungsi untuk membuat warga negara muda sadar akan hal yang dilakukan dengan berdasarkan moral-moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan selalu memperhatikan sikap yang baik (Somantri, 2001: 166).

Pengembangan Nilai-nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PPKn di SMA

Perwujudan untuk mengembangkan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran PPKn di sekolah menengah atas maka ada beberapa komponen yang perlu dilihat dan diperhatikan seperti kesiapan dari siswa untuk menerima nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara yang tidak hanya sebagai hafalan di kepala akan tetapi cara yang akan diterapkan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengembangan nilai-nilai pancasila melalui pembelajaran PPKn di SMA

| No | Nilai-nilai pancasila | Aktivitas yang diterapkan | Aspek yang dikembangkan |
|-----------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Ketuhanan Yang Maha Esa | Menyakini agama dan kepercayaan sesuai dengan ketentuan dari Tuhan | Pengetahuan |
| | | Berperilaku sesuai dengan aturan dalam agama yang dianut | Sikap |
| | | Menjalankan perintah dengan memperhatikan hal-hal untuk kebaikan | Keterampilan |

*Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama:
Memantapkan Iklim Kondusif Membangun Bangsa*

| No | Nilai-nilai pancasila | Aktivitas yang diterapkan | Aspek yang dikembangkan |
|-----------|---|---|--------------------------------|
| 2. | Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | Mampu bersikap adil kepada siapapun | Sikap |
| | | Memiliki tata krama yang baik dan memperlakukan orang yang berbeda agama, suku, ras | Keterampilan |
| 3. | Persatuan Indonesia | Menjaga hubungan baik dengan siswa yang berbeda keyakinan | Sikap |
| | | Tetap bersahabat meski perbedaan terlihat sangat mencolok seperti ras | Keterampilan |
| | | Bersemangat menolong siswa lain yang berbeda untuk tetap bersatu | Sikap |
| 4. | Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dan Kebijaksanaan dan Permusyawaratan dan Perwakilan | Memilih teman dengan secara adil tanpa ada perbedaan | Keterampilan |
| | | Menyelesaikan jika terjadi konflik yang ada di kelas dengan cara musyawarah | Keterampilan |

*Pengembangan Nilai-nilai Pancasila
Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas*

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| 5. | Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | Bersikap adil kepada semua orang tanpa terkecuali | Sikap |
| | | Menempati posisi yang benar jika hal yang dilakukan merupakan hal yang benar | Keterampilan |

Berdasarkan pada tabel 1 yang berarti bahwa nilai-nilai pancasila harus diterapkan dalam pembelajaran PPKn dengan selalu memperhatikan komponen yang ingin dicapai. Baik dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak dalam mewujudkan siswa yang berjiwa pancasila yaitu pancasialis. Jiwa pancasila harus ada di dalam jiwa siswa terutama siswa di sekolah menengah atas. Siswa SMA memiliki masa puber untuk menuju jati diri yang sebenarnya sehingga nilai-nilai pancasila perlu ditanamkan kepada siswa SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3):129-139.
- Damanhuri., Hardika W. L., Alwan. F. B., Rahman. I. N. (2016). Implementasi nilai-nilai pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Civic Education Journal*, 1 (2).
- Erwin, M. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusminiati. (2007). *Pengembangan pendidikan kewarganegaraan SD*. Jakarta: Depdiknas.
- Soemantri. N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukadi. (2013). Belajar dan pembelajaran PKn SD sebagai YADnya dalam rangka perwujudan dharma agama dan dharma negara berbasis konstruktivisme. *Cakrawala Pendidikan*, XXXII, 2.
- Tjiptabudy. J. (2010). Kebijakan pemerintah dalam upaya melestarikan nilai-nilai pancasila di era reformasi. *Jurnal Sasi*, 16 (3)
- Wardana, L. A. (2013). Studi kasus pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas IV SDN Pisang Candi II Kota Malang. Universitas Panca Marga, Probolinggo.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, LPPM UNS.
- Winataputra.U. S, dkk. (2009). *Materi dan pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.

ANALISIS BAHASA PADA BUTIR-BUTIR PANCASILA DITINJAU DARI KONSEP BERFILSAFAT GUNA MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER

Rosaliana Intan Pitaloka¹ dan Suryo Ediyono²
Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret
rosaliana.ip@student.uns.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis bahasa mengenai butir-butir Pancasila yang ditinjau dari konsep berfilsafat guna memperkuat pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah teks Pancasila. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa konsep berfilsafat merujuk pada berpikir rasional, bersifat umum, bersifat konseptual, bersifat koheren dan konsisten, bersifat sistematis, menyeluruh, bebas, dan bertanggung jawab. Hal ini memiliki pengaruh besar dalam usaha memperkuat pendidikan karakter yang tercermin dari bahasa yang digunakan pada setiap butir Pancasila.

Kata Kunci: pendidikan karakter, pancasila, berfilsafat

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan jembatan untuk berbagai agama agar dapat bisa bertemu, karena melalui penghormatan terhadap nilai-nilai yang telah disepakati bersama dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari beberapa nilai karakter yaitu kejujuran, kerja keras, tanggungjawab, dll. Pendidikan karakter memerlukan contoh dan keteladanan dalam setiap pelaksanaannya, oleh karena itu, butuh fasilitas yang memadahi untuk dapat mewujudkan hal itu.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tentu bukan suatu hal yang biasa yang hanya bisa dipahami ketika dibacakan pada saat upacara resmi. Pancasila dan segala keteladanannya mampu membawa bangsa Indonesia khususnya generasi penerus untuk dapat menelaah lebih dalam secara kebahasaan untuk dapat memahami apa yang sebenarnya terkandung di dalam butir-butir Pancasila. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis secara konsep berfilsafat melalui kebahasaan yang ada di dalam naskah Pancasila untuk dapat menelaah salah satu pendidikan karakter yaitu sikap bertanggungjawab yang ada untuk bisa dipahami secara menyeluruh sebagai bekal masa depan anak bangsa.

KERANGKA TEORI

1. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menurut Lickona (2013) adalah suatu upaya mempengaruhi sikap siswa untuk dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai etika yang berlaku. Sedangkan menurut Suyanto (2010) pendidikan karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.

Dalam bidang pengembangan budaya dan pendidikan karakter (2010) memaparkan beberapa nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa. Hal ini diberikan beberapa catatan untuk

siswa, guru dan sekolah mengenai karakter dasar yang harus dimiliki oleh siswa yaitu nyaman, jujur, peduli, cerdas dan bekerja keras, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa penambahan atau penekanan secara khusus terhadap satu karakter dari beberapa karakter yang dirumuskan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa penjelasan ahli di atas, maka dapat disintesis bahwa pendidikan karakter merupakan sesuatu hal yang penting untuk diwujudkan dalam diri setiap individu guna mempengaruhi sikap untuk menyesuaikan diri hidup dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada satu karakter saja untuk dapat dianalisis secara mendalam yaitu, karakter bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Konsep Berfilsafat

Konsep berpikir kefilosofan yang diungkapkan oleh Ediyono (2015: 7) bahwa konsep berpikir secara kefilosofan mengandung pengertian bahwa orang yang berfilsafat itu pasti berpikir dengan ciri-ciri tertentu yaitu berpikir secara radikal, bersifat umum, bersifat konseptual, bersifat koheren dan konsisten, bersifat sistematis, menyeluruh, bebas, dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Suriasumantri (2010:20) berfilsafat adalah seseorang yang memiliki pemikiran secara menyeluruh, mendasar dan juga spekulatif dengan tidak mengenyampingkan beberapa hal yang mendukung yaitu logika, etika dan estetika.

Berdasarkan pernyataan kedua ahli filsafat tersebut, maka dapat disintesis bahwa berfilsafat atau berpikir secara filsafat mendalam mengenai sesuatu hal dan meninjaunya dengan berbagai disiplin ilmu terapan yang dibutuhkan dalam konteksnya. Hal ini akan mendukung

terbentuknya generasi yang kritis terhadap ilmu dan pengetahuan serta mampu bertanggungjawab atas hasil yang diperolehnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian dalam penelitian ini berupa dokumen naskah Pancasila. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk meninjau butir-butir Pancasila dari segi kebahasaan dengan konsep berfilsafat.

PEMBAHASAN

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai makhluk spiritualitas yang memahami sila pertama sebagai salah satu dasar filsafat negara Republik Indonesia, maka seharusnya kita bisa menelaah lebih dalam mengenai makna yang bisa diungkap untuk menghadirkan pendidikan karakter bagi anak bangsa khususnya karakter tanggung jawab. Karakter bertanggung jawab untuk hidup yang lebih baik kaitannya dengan keyakinan masing-masing individu sangat penting untuk menjadi akar pemikiran yang lebih rasional dalam memaknai kata "*ketuhanan*". Dianalisis dari segi bahasa, mengesakan Tuhan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sebagai makhluk yang diciptakan oleh zat yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, peninjauan secara mendalam terhadap sila ke-1 secara kefilsafatan mengharapkan manusia dapat menghormati dan menghargai segala perbedaan dalam pemahaman ketuhanan masing-masing individu. Kaitannya dengan pendidikan karakter, ini sangat penting diterapkan guna membentuk karakter generasi penerus bangsa yang lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan di abad ke-21.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sebagai makhluk sosial yang seharusnya mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sila ke-2 dalam naskah Pancasila cukup memberikan gambaran secara jelas bagaimana manusia yang dianggap ideal. Perumusan demikian tentu sudah melewati berbagai pertimbangan dan dapat dilihat secara nyata bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang mampu memahami aspek kehidupan dengan sikap yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dianalisis dari segi bahasa, adil dan beradab merupakan dua kata yang memiliki makna sangat berbobot. Kaitannya dengan karakter tanggung jawab yang ditekankan pada masing-masing individu, tuntutan untuk dapat bertanggung jawab atas sikap netral dan tidak membedakan apapun serta tidak menganggap sebuah perbedaan sebagai halangan atau bibit masalah. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pola perilaku setiap individu khususnya generasi penerus bangsa Indonesia yang turut memiliki dan terikat pada dasar negara.

Persatuan Indonesia

Sebagai bangsa Indonesia dengan segala ragam budaya dan bahasanya, tentunya harus memahami bahwa tanpa adanya kesatuan dan kesatuan, mustahil untuk bisa bersama-sama menjadi bangsa yang maju. Jika dianalisis dari segi bahasa, persatuan adalah bergabungnya berbagai banyak hal yang berbeda dalam konteks ini adalah Indonesia. Peninjauan secara mendalam mengenai sila ke-3, diharapkan bangsa Indonesia harus mampu menyadari tentang adanya hidup bersatu dan kompak untuk menghadapi dunia yang lebih rumit. Karakter tanggung jawab yang harus dipahami adalah bagaimana anak bangsa mampu menjadi model penggerak untuk bisa menyatukan bangsa Indonesia dengan berbagai prestasi sebagai bentuk tanggung jawab menyadarkan kelalaian bangsa dalam memahami makna kesatuan dan kesatuan.

*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan*

Sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, perlu adanya pemahaman secara mendalam kaitannya dengan karakter bangsa. Hidup bermusyawarah merupakan filosofi dasar negara Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak pemikiran yang cemerlang yang perlu dikaji secara bijak demi menghasilkan sebuah perubahan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sebagai individu yang selalu menuntut keadilan terhadap berbagai hal yang terkadang tidak sesuai dengan harapan, seharusnya sikap sadar dan bertanggungjawab atas segala apa yang telah dilakukan wajib diterapkan pada masing-masing individu. Kaitannya dengan karakter anak bangsa, perlu adanya penerapan terhadap pendidikan sejak dini untuk mengenalkan dan diharapkan mempengaruhi sikap perilaku untuk lebih bertanggungjawab memaknai sebuah keadilan.

SIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mampu memberikan pendidikan karakter dalam konteks bertanggung jawab kaitannya dengan pengkajian secara konsep berfilsafat. Butir-butir Pancasila yang dianalisis secara kebahasaan, mampu memberikan pesan yang baik kepada generasi penerus bangsa untuk dapat bertanggung jawab dalam hidup berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Ediyono, Suryo. (2015). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Penerbit Kaliwangi.
- Lickona, Thomas. (2003). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues*. New York: Simon & Schuster.
- Lickona, Thomas. (2013). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Suriasumantri, Jujun S. (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suyanto. (2010). *Model Pembinaan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas
- Ristekdikti. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Tim Penulis Pusat Kurikulum. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI PERGURUAN TINGGI

Suyahman

Dosen PPKn-FKIP

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Surel: sym_62@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi. Subjek penelitiannya: dosen PKn dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKn di UMS Surakarta, objeknya: internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran PKn. Metode pengumpulan datanya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data dan metode. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif mengalir yang terdiri dari 3 langkah yaitu reduksi data, *display* data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan lemahnya nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator: nilai Ketuhanan: adanya kebiasaan mahasiswa melaksanakan ibadah zuhur dan asar tidak tepat waktu, ketidakjujuran mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen cenderung *copy paste*, membiarkan temannya melihat film atau gambar-gambar porno di *HP*. Nilai Kemanusiaan: sikap membedakan-bedakan dalam memilih kelompok diskusi, membedakan-bedakan dalam hal tolong-menolong, Nilai Persatuan: ketidakberanian mahasiswa melaporkan temannya yang meminum minuman keras, merokok, dan tidak sopan dengan dosennya, mengabaikan teman yang di-*bully* (pemelakan misalnya) oleh teman lainnya, membanggakan produk luar negeri, nilai Kerakyatan: memaksakan kehendak dalam berdiskusi, tidak menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda, tidak melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung

jawab, Nilai keadilan: pembagian tugas materi diskusi yang tidak adil, cenderung hidup berbudaya konsumtif. Simpulannya internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dengan cara dosen dalam memberikan perkuliahan senantiasa memberikan keteladanan-keteladanan dalam sikap, perilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak diajarkan dalam perkuliahan akan tetapi dididikkan oleh dosen melalui perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan setiap dosen dapat memberikan keteladanan nyata sikap, perilaku dan tindakannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila selama proses perkuliahan PKN.

Kata kunci: Nilai-Nilai Pancasila dan Pembelajaran PKN

Pendahuluan

Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda.

Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejarah membuktikan pada 1 Oktober 1965, persatuan dan kesatuan segenap kekuatan yang setia kepada Pancasila mampu mematahkan pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan mengubah Pancasila dan meninggalkan UUD 1945. Peristiwa tersebut

membuktikan usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan mendapat perlawanan rakyat Indonesia.

Nilai-nilai pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai pancasila harus menjadi cermin dalam bersikap, berperilaku dan berbuat bagi semua warga negara Indonesia. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, nilai-nilai pancasila harus diterapkan bagi mahasiswa dalam kehidupan di kampus perguruan tinggi. Karenanya pembelajaran khususnya mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa (MPK) yaitu di antaranya PKn tidak hanya sebatas transfer pengetahuan sehingga hanya menekankan ranah kognitif dan aspek ingatan saja, akan tetapi sebaliknya harus mengedepankan aspek sikap dan keterampilan mahasiswa.

Kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa kecenderungan dosen hanya menekankan aspek pengetahuan saja, dampaknya adalah sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa banyak yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn di Perguruan tinggi. Pokok permasalahan dirumuskan bagaimanakah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn pada mahasiswa di Perguruan tinggi?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai pancasila melalui pembelajaran PKn pada mahasiswa teknik elektro Universitas Muhammadiyah, Surakarta tahun akademik 2017-2018.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Demikian juga dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendapat lain yang dikemukakan Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif, antara lain adalah: Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual; Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang, dan Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

Subjek penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa teknik elektro semester I tahun akademik 2017-2018, dan objek penelitiannya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran PKn. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui kevalidan data, maka dilakukan triangulasi data dan triangulasi metode. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

interaktif yang terdiri dari 3 langkah yaitu reduksi data, *display* data, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Secara terminologis dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa definisi internalisasi yakni merupakan penghayatan atau proses pemahaman terhadap ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menyadari keyakinan akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Menurut Muhaimin (1996: 53) “dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, terdapat tahapan prosesi yang harus dilakukan oleh guru dalam menginternalisasi suatu nilai kepada anak asuh atau Mahasiswa”.

Menurut Muhaimin (1996: 53) dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan Mahasiswa atau anak asuh, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu a) Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan Mahasiswa atau anak asuh, b) Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara Mahasiswa dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik, dan c) Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi, pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Selanjutnya dalam konteks nilai-nilai Pancasila dapat dipahami sebagai berikut: Kata nilai yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *value*, berasal dari bahasa Latin *valare* atau bahasa Perancis Kuno *valoir*. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau

kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu subjek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Adapun definisi nilai menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kuperman (2005: 98) “nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif”. Sedangkan menurut Mulyana (2004: 9) “nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan”. Kemudian menurut Abdulsyani (2007: 52) “nilai dapat disebut sebagai ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik dan benar oleh masyarakat luas”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Berdasarkan dengan definisi itu maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Nilai mempunyai beberapa macam makna. Sejalan dengan itu, maka makna nilai juga bermacam-macam. Rumusan yang bisa peneliti kemukakan tentang makna nilai itu adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai (berguna) merupakan nilai (baik, benar atau indah) mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap “menyetujui” atau mempunyai sifat nilai tertentu dan memberi nilai,

menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Adapun sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut: a) Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia, b) Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal, dan c) Nilai berfungsi sebagai daya dorong/ motivator dan manusia adalah pendukung nilai.

Dalam konteks nilai-nilai pancasila sebagai *main subject* dalam penelitian ini maka pancasila sangat penting untuk dipahami mahasiswa, mengingat pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sumber daripada kajian nilai-nilai yang menjadi dasar konsep Peneliti. Pancasila juga merupakan salah satu dari empat pilar berbangsa dan bernegara selain pemahaman terhadap UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika. Sehingga “untuk mengerti dan memahami arti dan isi dari Pancasila dengan sebenarnya, maka penting untuk mengetahui pengertian pancasila baik dari segi etimologis, terminologis, dan historis pancasila” (C.S.T Kansil 2011:14).

Perumusan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam dari pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang. Pada tahun 1943 posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara Sekutu. Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari

pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri **Koyso** menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tcoshakai pada 1 Maret 1945.

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan bernilai apabila ia mempunyai kegunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) mengandung unsur religius (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Secara terinci nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang

maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Dia dzat yang Mahasempurna. Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: a) Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, e) Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki, f) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, g) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang, dan h) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut: a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya, c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (*tepo seliro*), d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, e)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. *Persatuan* berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut: a) Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. *Hikmat kebijaksanaan* mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. *Permusyawaratan* berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan mufakat. *Perwakilan* berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan Negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah: a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, d) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah, e) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah, f) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan g) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Secara rinci nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah: a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain, d) Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain, e) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, f) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. g) Suka bekerja keras, h) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan i) Suka melakukan

kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjabaran nilai-nilai Pancasila di atas, dalam kenyataannya banyak dilakukan pelanggaran dikalangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan sejak tanggal 23 Agustus hingga 23 Oktober tahun 2017. Dari hasil pengamatan dilakukan ditemukan beberapa pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa di antaranya: untuk nilai Ketuhanan: mahasiswa melaksanakan salat zuhur dan asar terlambat, mahasiswa memulai dan mengakhiri perkuliahan tidak dengan berdoa, mahasiswa mendengar ada kematian tidak memberikan reaksi apa-apa, mahasiswa tidak peduli terhadap temannya yang baru menjalankan pusasa Senin dan Kamis karena ketika makan dan minum berada di depan temannya yang sedang berpuasa, Nilai Kemanusiaan: dalam memilih kelompok diskusi mahasiswa membeda-bedakan agama, suku dan budaya, dalam memberikan pertolongan pilih kasih, dalam memberikan donor darah memilih temannya yang seagama, nilai Persatuan: mahasiswa tidak berani melaporkan kepada dosennya temannya yang mengerjakan tugas dengan cara plagiat, mahasiswa tidak berani melaporkan kepada dosennya yang melihat temannya asyik melihat video porno di HP, mahasiswa tidak berani melaporkan temannya yang memalak teman lainnya, mahasiswa tidak berani melaporkan temannya yang selalu menjadi provokator di kelasnya, sila Kerakyatan: dalam diskusi mahasiswa tidak menghargai dan menghormati pendapat temanya, dalam diskusi mahasiswa selalu memaksakan kehendaknya, mahasiswa tidak melaksanakan hasil diskusi secara bertanggung jawab, dan Sila Keadilan: dalam membagi materi diskusi mahasiswa tidak adil.

Demikian juga hasil pengamatan terhadap dosen ketika memberikan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ditemukan

beberapa hal yang kurang menginternalisasi nilai-nilai pancasila misalkan: ketika memulai dan mengakhiri perkuliahan dosen tidak mengajak mahasiswa untuk berdoa, ketika dosen terlambat datang tidak menjelaskan alasan keterlambatannya, ketika dosen mengakhiri perkuliahan lebih juga tidak menjelaskan alasannya, dosen tidak menegur mahasiswa yang terlambat, dosen dalam memberi nilai diskusi kelompok tidak adil, dosen kurang peduli terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi perkuliahaan, dosen kurang menghargai dan menghormati pendapat mahasiswa yang berbeda, dosen memaksakan kehendaknya ketika menjawab pertanyaan mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan saat ini kurang mampu untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Dampaknya adalah banyak sikap, perilaku dan perbuatan mahasiswa yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus UMS, Kedua: Perkuliahan pendidikan kewarganegaraan saat ini lebih menekankan pada target materi dan hanya menekankan aspek pengetahuan mahasiswa sehingga kurang menyentuh ranah sikap dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga: Dosen dalam memberikan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan kurang memberikan keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan yang mecerminkan nilai-nilai pancasila kepada mahasiswa.

Berdasarkan kenyataan di lapangan tersebut, maka harus diupayakan bagaimana perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang mampu menjadi sarana internalisasi nilai-nilai pancasila. Seperti hasil penelitian Nurdin (2016) yang menyimpulkan bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila jika dalam perkuliahan Dosen

memberikan contoh-contoh konkrit tentang sikap, eprilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai pancasila kepada mahasiswa. Juga Safriahti (2017) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila jika dalam proses perkuliahan dosen meghargai adanya perbedaan pendapat, dosen berlaku adil, dosen disiplin, dosen bersikap terbuka, dosen tidak memaksakan kehendaknya serta dosen mengawali dan mengakhiri perkuliahaan dengan berdoa, dan perkuliahan menyentuh pada ranah sikap, perilaku juga pengetahuan mahasiswa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui perkuliahan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa Teknik Elektro semester gasal tahun akademik 2017-2018 di UMS Surakarta: jika dalam proses perkuliahan dosen lebih menekankan pada aspek sikap, perilaku dan perbuatan, dosen menghargai dan menghormati adanya perbedaan pendapat selama perkuliahan berlangsung, dosen tidak memaksakan kehendaknya kepada mahasiswa, dosen bersikap adil dan terbuka, dosen memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan berdoa, dosen selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi mahasiswa, metode perkuliahan menggunakan bermain peran, demonstrasi, dan simulasi.

Referensi

- Aditya Wahyu Nugroho, 2014, *Makalah Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa*
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI)
- Bedjo, Akhyar Zainul. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Untuk Perguruan Tinggi, Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.*
- Hamid, Darmadi, 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Kabar pendidikan, 2011. *Proses Internalisasi Nilai*. (Online). (<http://kabar-pendidikan.blogspot.com>). Diakses tanggal 10 November 2017.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.336
- Mukhamad Murdiono. 2010. Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNYFISE Universitas Negeri Yogyakarta (e-mail: mukhamad_murdiono@uny.ac.id).
- Maftuh, Bunyamin. 2008. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Educationist II* (2): 134–43.

- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sumarsono. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, Syahrial. 2006. *Membangun karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: University Press.
- Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 Tentang Rambu-Rambu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Cemerlang.
- Wahyudi. 2016. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." In *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan 6 Agustus 2016*, 382–94.
- Winarno. 2005. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Widodo, Eko.Taufiqurrahman. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: CV Sari Ilmu Pratama*.

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PPKN SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 87 TAHUN 2017

¹Erna Gesti F (ernagesfana@gmail.com)

²Roni Yudo Kuncoro (iruna.4nieh@gmail.com)

³Syahrur Razy (razysyahrur@gmail.com)

Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Urgensi Pendidikan Karakter dalam PPKn sebagai implementasi PP Nomor 87 Tahun 2017, (2) Permasalahan pendidikan karakter dalam PPKn di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dari sumber data. Sumber data yang digunakan adalah karya tulis berupa jurnal, buku, ataupun karya tulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Langkah-langkah prosedur penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan makalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Urgensi Pendidikan karakter dalam PPKn sebagai implementasi PP Nomor 87 Tahun 2017. (2) Permasalahan Pendidikan Karakter dalam setiap pembelajaran PPKn di sekolah selalu diajarkan mengenai Pendidikan Karakter agar membentuk warga negara yang *good citizen* namun pada kenyataannya para peserta didik masih belum menemukan teladan yang mencerminkan warga negara yang dianggap *good citizen*.

Kata kunci: *Urgensi, Pendidikan Karakter, PPKn, Good Citizen*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini dunia mengalami perkembangan yang begitu pesat, salah satunya bidang pendidikan. Banyak negara-negara yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan di era globalisasi ini. Menurut Agus N Cahyo (2013, 16), “Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa”. Bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Mengutip dari Kompas data kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi.

Data lain menurut Litbang Kompas 158 kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004-2011, 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011, 30 anggota DPR periode 1999-2004 terlibat kasus suap pemilihan DGS BI, Kasus korupsi terjadi diberbagai lembaga seperti KPU, KY, KPPU, Ditjen pajak, BI, dan

BKPM. Kejahatan yang merugikan negara tersebut, anehnya dilakukan “oknum” orang yang berpendidikan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa hal ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan di negara kita yakni peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Urgensi Pendidikan karakter dalam PPKn. (2) Permasalahan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn adalah di sekolah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Pendidikan Karakter dalam PPKn sebagai implementasi PP Nomor 87 Tahun 2017?
2. Bagaimana permasalahan Pendidikan Karakter dalam setiap pembelajaran PPKn di sekolah?

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 5-15 November 2017. Tempat penelitian yakni SMP An-Nur Ungaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dan disajikan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) berdasarkan fakta.

H.B. Sutopo menyatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas,

tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip” (2002: 50-54), subjek adalah Guru PPKn dan objek penelitian sumber belajar, penggalan data teknik analisis data: H. B Sutopo (2002: 91) menyatakan bahwa “dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen tersebut adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti memperoleh data dari mewawancarai guru berinisial A. Dari wawancara yang dilakukan dengan A didapatkan hasil bahwa pendidikan karakter sangat penting dalam mata pelajaran PPKn dikarenakan PPKn merupakan mata pelajaran yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan akan tetapi mengajarkan sikap dan keterampilan. Guru A mengajarkan dalam pembelajaran di kelas pentingnya siswa mempunyai karakter yang baik, seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, toleransi. Dia mengatakan bahwa kalau kasus korupsi itu salah satu sebabnya adalah kurangnya sikap atau karakter jujur dan tanggung jawab yang baik kepada rakyat dan pemerintahan. Dengan mengajarkan hal tersebut beliau berharap jika siswanya kelak menjadi orang yang penting di dalam pemerintahan maka dia akan menjadi orang yang baik. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa guru itu *digugu lan ditiru* maksudnya adalah guru itu diteladani dan dicontoh maka dari itu guru wajib untuk mengajarkan kebaikan.

Cara mengajarkan karakter menurut guru A adalah dengan perbuatan maupun dengan kegiatan belajar mengajar. Contoh dari kegiatan belajar mengajar adalah seperti memberi contoh atau melakukan penayangan video yang berguna agar murid menjadi lebih paham mana tindakan yang baik dan patut ditiru dan mana tindakan

yang buruk yang tidak patut untuk ditiru. Selanjutnya beliau menjelaskan permasalahan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn adalah belum sesuai kondisi di sekolah dengan di rumah dan di masyarakat. Dalam hal ini maksudnya adalah di sekolah ditanamkan nilai-nilai kebaikan tentang karakter tetapi hal ini mungkin belum dilakukan atau diterapkan di lingkungan masyarakat ataupun keluarga. Contohnya di sekolah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi hal ini belum diterapkan dengan baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Misalnya, di lingkungan masyarakat membuang sampah sembarangan masih dapat ditoleransi atau masyarakat bersikap tidak peduli. Contoh lain, di sekolah diajarkan untuk selalu meminta ijin jika ingin meminjam atau memakai suatu barang kepada teman ataupun guru. Namun di lingkungan keluarga tidak semua siswa meminta ijin jika ingin meminjam atau memakai barang meskipun barang tersebut milik keluarga sendiri. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih perlunya komunikasi dan kerjasama yang kuat antara pihak sekolah, keluarga serta masyarakat dalam membentuk karakter siswa yang baik.

Pembahasan

1. Bagaimana urgensi pendidikan karakter dalam PPKn sebagai implementasi PP Nomor 87 Tahun 2017?

Berdasarkan data wawancara dengan salah satu guru PPKn di SMP An-Nur Ungaran dapat diketahui bahwa pendidikan karakter sangat penting dalam PPKn untuk mengajarkan sesuatu yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan lainnya agar siswa dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk sehingga mampu menjadi siswa yang *good and smart citizen*. Sebab siswa merupakan generasi penerus bangsa di mana nantinya mereka yang

akan memimpin Negara ini jadi pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini salah satunya dengan mata pelajaran PPKn.

Berkaitan dengan terbitnya PP Nomor 87 Tahun 2017 oleh Presiden Indonesia adalah sebuah bentuk upaya untuk penguatan karakter kepada siswa dari satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Salah satu pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran PPKn karena pada dasarnya memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan pendapat Thoman Lickona (dalam Winarno: 2013) mengenai perlunya pendidikan karakter di negara kita. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Pendidikan karakter diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dan menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Pendidikan karakter, bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. (Doni Koesoema: 2007)

PPKn merupakan pembelajaran formal dimana didalamnya, menurut Winarno (2013: 19) mengungkapkan “Kita dapat mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara. Tiga kompetensi tersebut sejalan dengan

kewarganegaraan yang baik menurut Branson (1998), yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (dalam Winarno 2013:19), hal ini yang sangat penting, sehingga perlu diadakannya peningkatan-peningkatan secara terus menerus oleh semua kalangan, terutama bidang pendidikan, PPKn merupakan sarana formal yang strategis untuk menyampaikan nilai-nilai kewarganegaraan untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter dikemukakan oleh Samsuri (2011: 20) yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

2. Permasalahan pendidikan karakter dalam PPKn di sekolah

Berdasarkan data wawancara dengan salah satu guru PPKn di SMP An-Nur Ungaran dapat diketahui bahwa permasalahan pembentukan karakter dalam mata pelajaran PPKn adalah kurangnya sinkronisasi atau kurangnya keterlibatan yang maksimal antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Hal ini dapat kita contohkan seperti penerapan kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya yang diajarkan di sekolah, jika hal ini tidak sesuai atau tidak diterapkan dengan baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat maka, hasil dari penanaman nilai kedisiplinan dalam membuang tempatnya akan sulit diterapkan, Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro (dalam <http://www.pendidikanmahir.com/2016/02/konsep-pendidikan-menurut-ki-hajar.html>) yaitu: pendidikan di lingkungan keluarga,

pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiga, sentra pendidikan tersebut sangat mempengaruhi watak dan kepribadian siswa, dan ketiganya saling berkaitan, maka dari itu untuk mengoptimalkan pendidikan karakter perlu adanya sinkronisasi antara sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Pendidikan karakter sesuai PP Nomor 87 Tahun 2017 akan berjalan dengan baik jika sudah ada keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada setiap lini satuan pendidikan yang ada di Indonesia dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas bahkan sampai perguruan tinggi. Di dalam masyarakat dan keluarga seperti agamawan, politisi, tokoh masyarakat, orang tua dan tokoh masyarakat lainnya berkomitmen dan memberikan teladan langsung kepada masyarakat terutama para generasi muda khususnya siswa untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan karakter sangat penting dalam PPKn untuk mengajarkan sesuatu yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan lainnya agar siswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan karakter atau budi pekerti yang baik maka akan tercipta generasi penerus bangsa yang baik pula, hal ini sesuai dengan tujuan PPKn untuk membentuk warga negar yang baik dan cerdas.

Permasalahan pembentukan karakter dalam mata pelajaran PPKn adalah kurangnya sinkronisasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat kita contohkan seperti penerapan kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya yang diajarkan di sekolah,

Saran

Perlunya sinkronisasi dalam pendidikan karakter yang mana antara penerapan di sekolah, keluarga dan masyarakat sesuai, agar pendidikan karakter dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2009). *Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Diperoleh 3 Februari 2015 dari <http://puskur.net/download/permendiknar16-2007.pdf>
- Agus N Cahyo. (2013). *Panduan Aplikasi Teori – Teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler*. Jogjakarta: Diva Press
- Doni Koesoema. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo
- <http://www.pendidikanmahir.com/2016/02/konsep-pendidikan-menurut-ki-hajar.html>) diakses 23 Februari 2018
- https://www.kompasiana.com/makhunzi/pendidikan-karakter-menanamkan-nilai-kejujuran_591eee426423bd57452350fb diakses 23 Februari 2018
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: diandra pustaka indonesia.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : Bumi Aksara

PANDANGAN ARUS BARU GERAKAN ISLAM DI INDONESIA TERHADAP IDEOLOGI PANCASILA: STUDI KOMPARATIF ANTARA PARTAI Keadilan Sejahtera DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Moh. Muchtarom
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membandingkan pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari arus baru gerakan Islam di Indonesia terhadap Pancasila. Respons PKS terhadap ideologi Pancasila menggunakan pola pemikiran normatif-aplikatif yang memahami Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara bukan sebagai ideologi agama, menjadi kesepakatan bersama (*common platform*), dan merupakan obyektivikasi ajaran Islam. Sedangkan HTI dengan pola pemikiran idealis-formalis memandang Pancasila sebagai *set of philosophy* (seperangkat gagasan filosofis), tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena dia tidak memiliki sistem operasional, hanya Islam dan kekhilafahan sebagai sistem yang cocok untuk menjalankan Pancasila, bukan sosialisme, kapitalisme, atau neoliberalisme.

PENDAHULUAN

Dialog antara agama dan Pancasila dimulai pada saat *founding father* bangsa Indonesia merumuskan ideologi dan bentuk negara. Di kalangan islamis menginginkan berdirinya negara berdasarkan ajaran agama Islam, sedangkan di kalangan sekularis menolaknya. Melalui perdebatan dan dinamika politik yang cukup panjang, sebagai jalan tengah dan langkah cerdas mereka bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masa orde baru, penguasa menjadi satu-satunya lembaga yang mengambil alih tafsir dan penerapan Pancasila di Indonesia. Mereka yang berseberangan dengan penguasa dicap sebagai anti Pancasila dan subversif. Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam beragama. Asas tunggal ini menjadi alat negara untuk memberengus gerakan Islam yang dianggap membahayakan regim. Penyeragaman asas tunggal ini menjadi pengalaman pahit dan traumatik bagi umat Islam yang berdampak pada penolakan Pancasila oleh sebagian kecil di kalangan Umat Islam (Muchtarom, 2017: 82).

Memasuki era reformasi, gerakan-gerakan Islam nonmainstream yang selama rezim orde baru berkuasa bergerak *silent* mulai menampakkan diri. Mereka bergerak secara *mondial* (mendunia) dengan perjuangan menerapkan Islam di seluruh dunia atau disebut sebagai gerakan Islam transnasional. Nama gerakan Islam transnasional ini mungkin masih menjadi wacana baru dalam kajian gerakan Islam di Indonesia.

Namun, untuk mengetahui gerakan Islam transnasional ini tidak hanya sekadar dipahami sebagai sebuah gerakan lintas negara atau bukan “murni” Islam Indonesia, karena jika hanya dengan alasan tersebut akan melahirkan permasalahan baru. Jika menilik gerakan keagamaan di Indonesia yang sudah eksis terlebih dahulu seperti NU

dan Muhammadiyah, muncul karena persentuhannya dengan dunia luar, terutama dari Timur Tengah. Kemudian, tradisi keilmuan yang dikembangkan di lingkungan NU dan Muhammadiyah sebagiannya juga diimpor dari Timur Tengah. Selain itu, yang lebih mendasar lagi bahwa sifat agama itu sendiri sebetulnya transnasional dalam pengertian lintas wilayah. Dengan demikian penamaan gerakan Islam transnasional ini memang masih memerlukan kategori-kategori khusus untuk mempertegas atau membatasi definisi yang lebih jelas tentang ideologi transnasional ini.

Dalam tradisi keilmuan Barat sebelumnya, penamaan yang hampir senada dengan makna ideologi transnasional memakai istilah fundamentalisme yang setidaknya digunakan dalam tiga pengertian (Esposito, 1992: 5-6) . Pertama, semua usaha untuk kembali pada kepercayaan dasar. Dalam konteks masyarakat Islam adalah usaha kembali kepada Alquran dan Hadis sebagai model hidup normatif. Kedua, pengertian yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Protestanisme Amerika. Fundamentalisme adalah gerakan Protestanisme abad 20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal sebagai hal yang fundamental bagi kehidupan dan ajaran Kristen. Bagi kebanyakan orang Kristen, label ini bernada penghinaan yang berarti dekat dengan sesuatu yang statis, kemunduran dan kejumudan. Ketiga, istilah untuk menyebut sesuatu yang terkait dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme.

PK Sejahtera dan HTI merupakan gerakan Islam yang lahir sesudah gerakan reformasi menumbangkan regim Orde Baru. Kemunculan keduanya menambah dinamika narasi sosio-politik dalam merespon isu-isu kebangsaan termasuk pandangan terhadap Pancasila (Muchtarm, 2017: vii). Mereka dianggap memiliki pandangan baru mengenai pemahaman agama dan kehidupan politik yang berbeda dengan gerakan Islam yang sudah ada di Indonesia. Termasuk respon terhadap eksistensi Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Banyak kalangan yang curiga terhadap ideologi yang dikembangkan oleh PK Sejahtera dan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun, kecurigaan tersebut harus berdasar dengan pembuktian fakta dan data yang benar, agar tidak ada kalangan yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk membedah dan membandingkan Pandangan PK Sejahtera dan HTI terhadap Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan studi dokumen. Tema yang dianalisis meliputi pandangan PK Sejahtera dan HTI tentang Pancasila. Dokumen yang dianalisis adalah artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan nasionalisme, globalisme, dan Islam. Analisis data menggunakan 4 (empat) tahapan analisis isi yakni *the decontextualisation, the recontextualisation, the categorisation, and the compilation* (Bengtsson, 2016: 8-14).

PANCASILA DALAM PANDANGAN PKS

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi pedoman berharga baik bagi penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Bagi penyelenggara negara, Pancasila menjadi acuan penyelenggaraan dan mekanisme bernegara. Bagi masyarakat konsensus atas nilai ideologi Pancasila dapat menjadi pengikat bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam kaitannya sebagai ideologi, Pancasila dapat berfungsi sebagai rujukan bersama (*common denominator*) semua golongan masyarakat baik suku, ras, agama, dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, 1997: 90).

Namun, pascareformasi pembicaraan mengenai Pancasila jarang dilakukan baik oleh para penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Ada kesan bahwa pembicaraan mengenai ideologi negara itu di jauhi dan

tidak perlu untuk dibicarakan. Mungkin orang gamang untuk berbicara pancasila, takut terbawa pada pembicaraan filosofis yang berlarut-larut. Atau mungkin pula pancasila dianggap sudah selesai sehingga tidak perlu dibicarakan lagi (Winarno, 2006: 39).

Bahkan kini orang bebas melakukan kritik apapun dan terhadap siapapun, termasuk kepada hal-hal yang dulu disakralkan, sehingga tabu untuk dikritik seperti pancasila. Misalnya, ada usaha dari sekelompok masyarakat yang menginginkan reformasi ideologis dengan upaya mengganti pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Demikian juga dari berbagai tulisan yang bernada ketidakpercayaan atas Pancasila seperti “Neo Pancasila”, “Hari Kejahilan pancasila”, dan “Mitos Kesaktian Pancasila”.

PK Sejahtera memahami pancasila sebagai ideologi berbangsa bukan dipahami sebagai ideologi agama, yang menjadi kesepakatan bersama (*common platform*) oleh rakyat, maka antara agama dan pancasila tidak bertentangan. Asalkan pancasila tidak menjadi agama karena akan bertabrakan dengan keyakinan agama. PK Sejahtera memiliki AD/ART, di mana di dalamnya mengandung tujuan didirikannya partai sesuai dengan tujuan negara di antaranya tentang pancasila. Sehingga, PK Sejahtera tidak mempermasalahkan keberadaan pancasila dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Muatan pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dari sila pertama sampai sila kelima.

Pancasila dalam Pandangan PK Sejahtera adalah bagian daripada fakta konstitusional bangsa. Dia disebut dalam dokumen sebagai asas negara. Dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera pasal 5 ayat 1 tujuan didirikannya PK Sejahtera adalah terealisasinya tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Jadi tujuan didirikan PK Sejahtera salah satunya adalah merealisasikan tujuan nasional yang di antaranya adalah pancasila.

PK Sejahtera meyakini pancasila sebagai *common platform* yang menjadi konsensus bangsa, dan tidak ada keinginan untuk melakukan penggugatan terhadap pancasila. PK Sejahtera sangat menghormati dan tidak mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta tidak pernah ada keinginan untuk mengganti pancasila dengan Islam. PK Sejahtera memiliki nilai-nilai sendiri yang dianggap mampu menjiwai karakter partai yang diambil dari ajaran Islam.

Argumentasi itulah yang menjadikan PK Sejahtera tidak menggunakan Pancasila sebagai asas partai, tetapi berasaskan Islam. Alasan yang lain, Pancasila dianggap memiliki ruang lingkup yang sempit sehingga tidak mampu mewartakan kebutuhan-kebutuhan personal, dan hanya masuk dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Keadilan Sejahtera menggunakan asas Islam karena ada dua wilayah, pancasila tidak dapat masuk ke wilayah privat tetapi hanya masuk ke wilayah kehidupan berbangsa, sedangkan Islam mampu masuk ke wilayah-wilayah privat yang tidak dapat dimasuki oleh pancasila, berarti dalam hal ini ada pembagian wilayah antara pancasila dan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang politik di Indonesia membolehkan sebuah partai tidak menggunakan pancasila sebagai asas. Maka sebagai partai dakwah, PK Sejahtera menggunakan nilai-nilai Islam sebagai asas. Di mana nilai-nilai Islam lebih luas daripada pancasila. Yang penting bukan asas partainya tetapi yang lebih penting adalah memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini. Penerapan pancasila di Indonesia ada *gap* antara nilai-nilai yang ada pada pancasila dengan praktik yang dilakukan oleh penguasa. Jadi sebenarnya bukan pada ajaran pancasilanya yang keliru, tetapi pada tataran penerapannya yang menyimpang dari Pancasila. Dan sebenarnya ketika seseorang menjalankan ajaran Islam berarti dia telah mempraktikkan Pancasila. Artinya penerapan Pancasila bukan

pada bentuk konkretnya tetapi hanya menjadi nilai-nilai yang sebenarnya inheren dengan ajaran agama.

Dengan demikian PK Sejahtera memandang bahwa Pancasila merupakan transformasi ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam kerangka berbangsa dan bernegara, atau meminjam istilah Kuntowijoyo pancasila adalah objektivikasi ajaran Islam (1997: 85).

PANCASILA DALAM PANDANGAN HTI

Pada tataran historis-ideal sebenarnya telah ada kesepakatan bersama bahwa pancasila adalah konsensus bangsa (*common platform*) yang telah diterima semua pihak sebagai dasar bernegara, namun pada tataran empiriknya muncul gugatan-gugatan terhadap Pancasila yang dilakukan sebagian dari masyarakat Indonesia. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara tersebut pada masa sekarang sesungguhnya telah dinyatakan oleh negara melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai konsensus ulang bangsa atas pancasila baik bagi para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia.

HTI menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa yang disepakati bersama. Namun, HTI menolak sistem yang menjalankan pancasila yang diarahkan kepada sosialisme, kapitalisme, atau neoliberalisme. Artinya, selama ini operasionalisasi pancasila sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalamnya, di mana penerapan pancasila disesuaikan dengan selera para penguasa. Penyebabnya adalah bahwa sebagai *setof phylosophi* (seperangkat gagasan filosofis), Pancasila tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena dia tidak memiliki sistem operasional.

Pancasila adalah *setof philosophy* yang dianggap penting oleh *founding fathers* negeri ini. Namun, untuk mewujudkan nilai-nilai

penting tersebut, maka Pancasila membutuhkan sistem yang mampu mewujudkannya. Sistem yang selama ini diterapkan di negeri ini terbukti gagal merealisasi apa yang dicita-citakan oleh Pancasila. Hanya ada satu sistem lain yang telah terbukti dan teruji selama 13 abad penerapannya. Syariah Islam sebagai sebuah sistem mampu mewujudkan secara praktis *sets of philosophy* itu". Pancasila tidak ada yang salah, tetapi yang tidak tepat adalah *underline* sistemnya. Ordela atas nama pancasila membawa bangsa Indonesia menuju sistem yang sosialis, Orde baru atas nama pancasila membawa Indonesia menuju sistem kapitalis, Orde reformasi menuju sistem neoliberalis. Maka HTI memerangi *underline* sistem ini, tidak kepada pancasila dan nasionalisme.

HTI memberikan solusi rasional untuk melakukan revitalisasi Pancasila, yaitu dengan cara penegakan syariah untuk menggantikan sosialisme atau kapitalisme dan liberalisme yang dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selama ini yang telah terbukti gagal membawa negeri ini ke arah yang dicita-citakan. HTI juga menolak, apabila pancasila ditarik kembali menjadi asas tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Mr. Kurnia usulan asas tunggal lahir dari semangat untuk memberangus Islam politik dan penegakkan syariah Islam. Arus besar penegakkan syariah Islam di Indonesia, apalagi Konferensi Khilafah Internasional berhasil diselenggarakan HTI dengan spektakuler, memunculkan kegentaran pada diri penguasa internasional maupun lokal. Diambilah 'jurus mabuk' dengan usulan asas tunggal. Pada sisi lain, justru hal tadi makin membunahkan semangat untuk menjadikan syariah dan Khilafah sebagai solusi bagi Indonesia yang lebih baik, dan umat yang lebih baik.

Ide menguatnya kembali gagasan asas tunggal Pancasila karena ada kalangan tertentu yang berniat jika pengasas tunggalan parpolini berhasil, mereka juga akan berusaha untuk

mengasastunggalkan kembali seluruh ormas. Ini sasaran mereka berikutnya. Di kalangan nasionalis sekular juga merasa khawatir dengan makin maraknya organisasi massa Islam yang secara vokal meneriakkan penegakan syariah. Lebih mengkhawatirkan lagi, gerakan ini makin lama tampaknya makin mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan pengasas tunggalan kembali ormas, diharapkan kecenderungan menguatnya ormas Islam yang bercorak seperti itu akan pupus dengan sendirinya. Walhasil, *se k u l a r i s m e* akan tetap berjaya, dan mereka akan tetap terus berkuasa selama-lamanya.

KESIMPULAN

Islam di Indonesia sangat santun dan adaptif terhadap nilai dan budaya bangsa. Salah satunya produk Pancasila menjadi bukti wajah Islam yang sangat kooperatif dalam menjalin persahabatan dan menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, bagi gerakan-gerakan Islam yang sekarang ini masih berusia muda hendaknya mempelajari dan mendalami suasana kebatinan masyarakat Indonesia dan mampu mentransformasikan diri dengan wajah keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Esposito, John L. 1992 *The Islamic Threat Myth or Reality?*. New York: Oxford University Press
- Bengtsson, M. 2016. *How to plan and perform a qualitative study using content analysis in Nursing Plus Open*, 2, (2016).
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Muchtarom, Moh. dkk. 2017. *Membangun Relasi Islam dan Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisme dalam Prosiding Penguatan Spirit Kebangsaan di Tengah Tarikan Primordialisme dan Globalisme*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNNES.
- Muchtarom, Moh. 2017. *Nasionalisme Gerakan Islam di Indonesia: Studi Komparatif PKS dan HTI*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Winarno. 2006. *Respons Umat Beragama Terhadap Pancasila Sebagai Sarana Integrasi Bangsa (Studi tentang pandangan dan sikap umat beragama di Surakarta)*, *Jurnal PKn Progresif* edisi vol.1 No.